



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT KERJA
KOMISI XI DPR RI**

Tahun Sidang : 2019-2020
Masa Persidangan : I
Rapat ke- : 10 (Sepuluh)
Jenis Rapat : Raker
Dengan : Gubernur Bank Indonesia
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Senin, 11 November 2019
Waktu : 11.00 WIB s.d 15.40 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi XI DPR RI
Ketua Rapat : H. Dito Ganinduto, MBA
Sekretaris Rapat : Drs. Urip Soedjarwono
Acara : Evaluasi Kinerja 2019 dan Rencana Kerja 2020
Hadir : GUBERNUR BANK INDONESIA (PERRY WARJIYO)

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (H. DITO GANINDUTO, M.B.A./F-PG):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua,
Shalom,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan.

Yang terhormat saudara Gubernur Bank Indonesia beserta jajarannya.
Yang terhormat Pimpinan dan anggota Komisi XI DPR RI dan hadirin yang berbahagia.

Menurut laporan dari sekretariat Komisi XI DPR, rapat kerja Komisi XI telah dihadiri dan menandatangani daftar hadir sebanyak 20 orang, 7 fraksi. Dengan demikian kuorum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 251 Ayat 1 Peraturan DPR tentang Tata Tertib telah terpenuhi. Untuk itu dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim* izinkanlah kami membuka rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Setuju?

(RAPAT DIBUKA PUKUL 11.00 WIB)

Saudara Gubernur Bank Indonesia, para anggota dewan serta hadirin yang kami hormati.

Mengawali rapat kerja hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, tuhan yang maha kuasa, karena berkat rahmat hidayah dan karunianya pada hari ini kita dapat menghadiri acara rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan saudara Gubernur Bank Indonesia dalam keadaan sehat walafiat. Semoga hal-hal yang akan kita bicarakan dan simpulkan pada hari ini dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara.

Agenda rapat kita hari ini adalah:

1. Evaluasi kinerja tahun 2019 dan rencana kerja tahun 2020, serta penjelasan rencana kerja.
2. Anggaran tahunan Bank Indonesia RATBI tahun 2020.

Tapi mengingat bahwa Pak Gubernur ada ratas dengan presiden jam 12.30 harus meninggalkan tempat disini, kalau kita sepakati mungkin Pak Gubernur menyampaikan mengenai RATBI tahun 2020 dulu sehingga besok kita langsung membentuk panja penerimaan dan pengeluaran, sehingga besok panja tersebut

dapat kita laksanakan, setelah itu baru evaluasi kinerja, kalau tidak selesai kita lanjutkan untuk dijadwalkan kembali.

Saudara Gubernur Bank Indonesia, para anggota Komisi XI DPR RI yang kami hormati serta hadirin yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bahwa ketidakpastian global masih menjadi faktor eksternal yang berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Sentimen global tersebut berpengaruh terhadap nilai tukar rupiah saat ini, ketidakstabilan nilai tukar juga disebabkan oleh penyesuaian likuiditas yang dilakukan oleh investor global yang mengurangi penempatan dananya di negara-negara *emerging market* termasuk Indonesia.

Dalam rangka menjaga stabilitas nilai tukar yang memiliki dampak langsung terhadap perekonomian nasional, Bank Indonesia pada tahun 2019 telah menempuh kebijakan-kebijakan yang dapat mendukung penguatan perekonomian nasional melalui kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah.

Selanjutnya Gubernur Bank Indonesia melalui surat nomor 21/9/GBI/... Tanggal 15 Agustus 2019 telah menyampaikan rencana anggaran penerimaan operasional Bank Indonesia tahun 2020 sebesar Rp 32.226.862.000.000 atau meningkat sebesar 18,70% dibanding anggaran penerimaan operasional tahun 2019. Sedangkan rencana anggaran pengeluaran operasional adalah sebesar 11.146.071.000.000 atau menurun meningkat 12,56% dibandingkan anggaran pengeluaran operasional tahun 2019.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas maka pada kesempatan rapat kerja hari ini Komisi XI DPR RI ingin memperoleh penjelasan Gubernur Bank Indonesia mengenai kinerja Bank Indonesia tahun 2019 dan rencana kerja tahun 2020 sekaligus rencana anggaran tahun Bank Indonesia tahun 2020.

Selanjutnya untuk menghemat waktu, kami persilakan kepada saudara Gubernur Bank Indonesia untuk menyampaikan penjelasan dan pemaparannya. Tetapi sebentar Pak, karena ini adalah rapat perdana, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dan Pimpinan Komisi XI DPR RI, demikian juga nanti dari Bank Indonesia sebelum mulai mungkin perkenalan.

Mungkin dari ujung dulu, Pak Harry Poernomo silakan. Oh ada Pak ini, silakan Pak.

F-PKB (ALI AHMAD):

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih Pimpinan. Kami dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Ali Ahmad, nomor anggota A-40 dapil V Jatim Malang Raya (Kab/Kota Malang dan Batu).

Terima kasih demikian.

F-P. GERINDRA (Ir. H. HARRY POERNOMO):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Saya masih tetap namanya, Harry Poernomo, masih di Gerindra, masih mewakili daerah Jawa Tengah VI (Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo). Mudah-mudahan sinergitas kita semakin mantap. Terima kasih selama ini kerja samanya.

Terima kasih

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

F-PKS (Ir. H.A. JUNAIDI AULY, M.M.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sama masih juga, Ahmad Junaidi Auly dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, daerah pemilihan Lampung II (Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Way Kanan, Tulangbawang, Tulangbawang Barat, dan Mesuji), kalau Mesuji langsung ingat Lampung ya Pak. Baik saya kira ini, terima kasih atas kerja samanya selama ini mudah-mudahan kedepan bisa lebih baik lagi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

F-PKS (H. HIDAYATULLAH, S.E.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Pimpinan Komisi XI dan anggota yang terhormat,
Bapak Dewan Gubernur dan para deputi yang kami hormati.**

Perkenalkan nama saya Hidayatullah dari daerah pemilihan I Sumatera Utara (Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, dan kota Tebing) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

F-PDIP (DOLFIE O.F.P.):

Selamat pagi Pak Gubernur, Bapak Deputi Gubernur, Ibu Deputi Gubernur.

Perkenalkan nama saya Dolfie dari Fraksi PDI-Perjuangan daerah

pemilihan Jawa Tengah IV (Karanganyar, Wonogiri, dan Sragen).

Terima kasih.

F-P. GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Saya pakai salam bung karno aja, merdeka!

Saya Ramson Siagian atau bung Ramson dari dapil Jawa Tengah X (Kabupaten Pemalang, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang) dari Fraksi Partai Gerindra.

Terima kasih.

F-PDIP (SIHAR P.H. SITORUS):

Terima kasih Pimpinan Komisi XI dan rekan-rekan anggota Komisi XI.

Selamat pagi kepada Bapak Gubernur Bank Indonesia dan jajarannya.

Perkenalkan nama saya Sihar Sitorus, nomor anggota A-139, dari daerah pemilihan Sumatera Utara II meliputi 19 Kota/Kabupaten, 3631 Desa, hampir setengah luas Sumatera Utara, dari Fraksi PDI-Perjuangan.

Terima kasih.

F-PG (PUTERI ANETTA KOMARUDDIN, B.Com.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Izin Pimpinan, senior-senior anggota Komisi XI, Pak Perry beserta jajaran dari BI. Perkenalkan nama saya Puteri Komaruddin, anggota termuda dari Komisi XI, kebetulan dulu saya pernah berkantor di komplek BI juga karena saya dulu alumninya di OJK, jadi semoga sekarang kita bisa bermitra dengan baik, bersinergi dengan baik. Oh ya tadi, daerah pemilihannya Jawa Barat VII (Kabupaten Purwakarta, Karawang, dan Bekasi) dari Fraksi Partai Golkar.

Terima kasih.

F-PKB (ELA SITI NURYAMAH, S.Sos.I.):

Ya terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Perkenalkan nama saya Ela Siti Nuryamah, dapilnya sama dengan Pak Jon, Lampung II tujuh kabupaten, nomor anggota A-8 dari Fraksi PKB.

Terima kasih. *Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

F-PD (LINDA MEGAWATI, S.E., M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Komisi XI yang saya hormati, juga disini ada Gubernur Bank Indonesia beserta jajarannya.

Perkenalkan nama saya Linda Megawati, daerah pemilihan saya Jawa Barat IX meliputi Subang, Sumedang, Majalengka. Saya dari Fraksi Demokrat.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Sebelum ke kanan, Pak Prof mau memperkenalkan meskipun udah terkenal gak ada salahnya Pak.

F-PDIP (Prof. Dr. HENDRAWAN SUPRATIKNO):

Terima kasih Pimpinan, rekan-rekan anggota Komisi XI, Gubernur Bank Indonesia dengan segenap jajarannya.

Selamat siang dan salam kebangsaan untuk kita semua

Hendrawan Supratikno, Fraksi PDI-Perjuangan (A-201), daerah pemilihan Jawa Tengah X (Kabupaten Pemalang, Kabupaten dan Kota Pekalongan, dan Kabupaten Batang). Veteran di Komisi XI, jadi sudah mengenal baik Pak Perry Warjiyo dan kawan-kawan, mudah-mudahan sinergitas di masa depan bisa ditingkatkan.

Terima kasih.

Salam kebangsaan.

KETUA RAPAT:

Pak Musthofa silakan.

F-PDIP (H. MUSTHOFA):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Atas seizin Pimpinan Komisi XI, perkenalkan saya, Pak Gubernur BI beserta seluruh deputi dan jajarannya. Nama saya Musthofa, daerah pemilihan daerah Jawa Tengah II (Kudus, Demak, dan Jepara). Nomor anggota A-180.

Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

F-PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan yang saya hormati, rekan-rekan yang saya hormati, Pak Gubernur Bank Indonesia beserta deputi Gubernur Bank Indonesia serta jajaran yang saya hormati.

Perkenalkan nama saya Misbakhun Pak, Mukhamad Misbakhun Pak, dapil Jawa Timur II meliputi Kabupaten/Kota Pasuruan, Kabupaten/Kota Probolinggo, dari Fraksi Partai Golkar. Terima kasih Pak mudah-mudahan BI makin sering membantu supaya saya terpilih lagi nanti.

F-PKB (BERTU MERLAS, S.T.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Nama saya Bertu Merlas, panggilannya Bebep Pak. Nomor anggota A-06, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dapil Sumatera Selatan II meliputi 11 kabupaten, kalau disebutin semua Pak cukup panjang memakan waktu dua menit jadi cukup dapil II Sumatera Selatan saja.

Terima kasih.

F-PPP (Dra. Hj. WARTIAH, M.Pd.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Atas izin Pimpinan, perkenalkan nama saya Hj. Wartiah, dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, nomor A-474, daerah pemilihan NTB II yang meliputi Lombok yaitu Kota Mataram, Lombok Utara, Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Lombok Timur. Mudah-mudahan kedepan sinergitas terbangun antara Komisi XI dengan jajaran dari BI.

Demikian dari saya.

Wallahul Muwaffiq ila Aqwamit Tharieq.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

F-PD (Hj. VERA FEBYANTHY, M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Senang bisa bertemu dengan Pak Perry. Saya Vera Febyanthi Pak, dan juga terhormat kepada jajaran Gubernur Bank Indonesia. Saya mengingat ketika terakhir rapat dengan Pak Perry itu tahun 2007, Bapak masih menjabat Direktur Departemen Kebijakan Mikroprudensial. *Alhamdulillah* saya diberikan kesempatan ataupun diberikan tugas oleh Fraksi Partai Demokrat, masih partai yang sama Pak, di Komisi XI ini adalah komisi dimana saya memulai karir politik saya.

Terima kasih, semoga BI kedepannya bisa lebih erat lagi dan saya tau integritas dan kapabilitas Pak Perry ini luar biasa, beliau ini cocok untuk menjadi Gubernur Bank Indonesia karena memang sudah lama menunggu ya Pak ya, saya ingat banget historinya saat itu, sudah lama dan pernah juga berkali-kali, ya inilah akhirnya Pak Perry di puncak tertinggi di BI satu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Bu Susi, Bu Susi silakan Bu Susi.

F-P. GERINDRA (SUSI MARLENY BACHSIN, SE, MM):

Terima kasih Pimpinan.

**Yang terhormat Pimpinan dan seluruh rekan-rekan di Komisi XI DPR RI,
Yang terhormat Gubernur BI.**

Perkenalkan nama saya panjang tapi memang disingkat Syahdona nya dikeluarkan, bisa dipanggil Susi Syahdona Marleny Bachsin, bisa dipanggil Susi, bisa dipanggil Dona, terserah maunya apa. Saya dari dapil Bengkulu meliputi sembilan kabupaten satu kota, dan dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ibu Indah.

F-PDIP (INDAH KURNIA):

Selamat siang, nama pendek saya Indah, panjangnya Indaaaaah. Daerah

pemilihan Jawa Timur I (Surabaya, Sidoarjo), Fraksi PDI-Perjuangan.

Selamat siang Pak Perry, mas Dody, kemarin FESyar-nya sukses ya di Surabaya, Pak Sugeng, Pak Erwin, dan Ibu yang sangat semangat ini sampai lupa namanya, ya taulah Bu Rusmaya beserta seluruh jajaran.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik demikianlah tadi Pak perkenalan dari, *eh* Pak ini belum Pak Eriko, silakan Pak Eriko.

WAKIL KETUA KOMISI XI DPR RI/F-PDIP (Ir. ERIKO SOTARDUGA B.P.S.):

Terima kasih.

**Ketua dan rekan-rekan Komisi XI yang saya banggakan hormati,
Bapak Gubernur Bank Indonesia, Ibu Bapak deputy Gubernur Bank
Indonesia maupun seluruh yang mendampingi yang hadir pada hari ini.**

**Salam sejahtera untuk kita semuanya,
Selamat siang.**

Nama saya Eriko Sotarduga B.P.S, bukan BPK Pak, kalau BPK artinya lain lagi nanti, di Sumatera Utara beda kalau BPK itu. Nah kalau BPS ini bukan biro pusat statistik juga Pak, bukan pula bapaknya bung sotarduga, bukan Pak, jadi ini memang panjang namanya Pak, tidak muat di KTP jadi disingkat jadi Eriko Sotarduga B.P.S biar ajalah seperti itu Pak. Saya dari dapil II Jakarta Selatan, Pusat, Luar Negeri, tempat Bapak berkantor dan tinggal itu dapil saya. Jadi ngingatnya gampang Pak, jadi kan kalau Bapak-Bapak keluar dari rumah, masuk ke kantor, ingat nama Eriko, karena memang cuma itu yang ada dapilnya Pak seperti itu. Jadi saya A-159 dari Fraksi PDI-Perjuangan.

Demikian dulu perkenalan kita selama ini mudah-mudahan kita bekerja sama dengan lebih baik lagi kedepan ini untuk bangsa dan negara, merdeka!

KETUA RAPAT:

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Saya Dito Ganinduto Pak, dari Fraksi Partai Golkar, daerah pemilihan Jawa Tengah VIII (Cilacap, Banyumas) dan sebelumnya saya Pimpinan Komisi VI dan

sekarang baru di XI ini Pak.

Saya kira itu aja, selanjutnya mungkin Bapak bisa memberikan, kita sepakati bahwa sekarang sudah jam 11.30, Pak Gubernurnya ada ratas jam 12.30, jadi kami persilakan Bapak untuk mengantarkan RATBI 2020 setelah itu baru rencana kerja 2019-2020, apabila Bapak akan meninggalkan, kita sepakati kalau bisa dilanjutkan dengan dewan gubernur yang lain. Setuju ya? Setuju ya oke.

(RAPAT: SETUJU)

Silakan Pak.

GUBERNUR BANK INDONESIA:

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan,

Shalom.

Yang kita hormati, Bapak-Bapak Pimpinan Komisi XI dan Ibu-Ibu Bapak-Bapak anggota dewan Komisi XI.

Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul untuk mengadakan rapat kerja pada hari ini ini dan untuk itu marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT karena atas karunianya kita dapat berkumpul di dalam rapat ini. Tentu saja kami mengucapkan selamat kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang terpilih dan kemudian menjadi mitra kami di Komisi XI baik yang lama maupun yang baru, lamanya juga ada yang lama sekali, ada yang lama sebentar, yang baru pun juga ada yang sebetulnya tidak baru karena dulu juga pernah kita juga bermitra. Merupakan salah satu kehormatan kami karena selama ini memang sinergitas yang kami bangun antara Bank Indonesia dengan Komisi XI itu sangat erat, sama-sama kita bermitra kemudian bagaimana kita bisa melakukan sinergitas di dalam sama-sama membangun ekonomi kita.

Sebelum saya menyampaikan lebih lanjut, perkenalkan kami dari dewan gubernur Bank Indonesia, dewan gubernur Bank Indonesia itu terdiri dari enam, satu gubernur, satu deputi gubernur senior, dan empat anggota deputi gubernur.

Perkenalkan saya Perry Warjiyo sebagai Gubernur Bank Indonesia, daerah asalnya, kalau Bapak Ibu dapilnya saya harus sampaikan daerah asalnya adalah dari desa Gawok, saya anak petani, kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo,

Solo, Jawa Tengah. Itu adalah saya sepanjang hidup saya adalah berkarir di Bank Indonesia.

Mohon maaf, deputi gubernur senior kami Ibu Destry Damayanti sedang melakukan tugas mewakili saya untuk sidang di Bank for International Settlements mewakili saya karena saya harus ada disini menyampaikan salam hormat kepada Bapak Ibu sekalian. Tentunya pada kesempatan lain Ibu Destry Damayanti akan bersama-sama kami.

Empat deputi gubernur kami, kami perkenalkan adalah deputi gubernur Erwin Rijanto, daerah asalnya adalah Jogjakarta (DIY), kemudian juga deputi gubernur Rosmaya Hadi, daerah asalnya adalah Bandung (Jawa Barat) mojang priangan, kemudian di sebelah

KETUA RAPAT:

Pak Gubernur, sekalian bidang tugasnya Pak.

GUBERNUR BANK INDONESIA:

Ya mohon maaf. Bidang tugasnya kalau Pak Erwin Rijanto ini membidangi yang kita sebut stabilitas sistem keuangan, stabilitas sistem keuangan itu di kebijakan makroprudensial, surveilans di dalam sistem keuangan, termasuk juga membawahi operasi moneter. Sementara Ibu Rosmaya Hadi itu adalah deputi gubernur yang membawahi seluruh kantor-kantor perwakilan Bank Indonesia, disamping juga terkait dengan logistik, kemudian terkait juga pengadaan dan juga bersama nanti Pak Sugeng untuk pengedaran uang. Sementara itu deputi gubernur Sugeng daerah asalnya adalah Purworejo, Banyumas, beliau yang membawahi adalah di kebijakan sistem pembayaran termasuk mengenai digital ekonomi keuangan dan juga mengenai pengembangan IT itu adalah dibawah Pak Sugeng. Deputi gubernur Dody Budi Waluyo daerah asalnya adalah dari Jakarta Selatan, beliau yang membawahi kebijakan moneter, demikian juga terkait dengan internasional dan juga beberapa yang terkait juga dengan ekonomi keuangan syariah. Sementara itu deputi gubernur senior itu membawahi mengenai manajemen strategi, komunikasi, maupun juga terkait dengan pengelolaan devisa. Saya banyak untuk melihat secara keseluruhan. Demikian itu adalah beberapa perwakilan perkenalan dari kami.

Sekali lagi selamat dan *we are looking forward* untuk sinergitas yang selama ini sangat erat, kami akan bersemangat dan selalu membawa sinergitas itu yang semakin erat lagi kedepan dalam melaksanakan tugas-tugas Bank Indonesia maupun juga bersama-sama berkontribusi terhadap ekonomi Indonesia.

Dalam kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih untuk rapat kerja ini untuk menyampaikan evaluasi pelaksanaan anggaran tahunan Bank Indonesia operasional tahun 2019 dan rencana anggaran tahunan Bank Indonesia operasional untuk tahun 2020 sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Bank

Indonesia Pasal 60 Ayat 3 yang menetapkan penyampaian anggaran operasional Bank Indonesia kepada DPR RI untuk memperoleh persetujuan sebagaimana tadi disampaikan oleh Pimpinan, ATBI dan RATBI sudah kami sampaikan pada 15 Agustus 2019 yang lalu.

Paparan kami akan singkat mencangkup mengenai tiga hal, *slide* berikutnya, sebelum kami ingin menyampaikan evaluasi ATBI operasional 2019, RATBI operasional untuk 2020, kami ingin menyampaikan dulu bagaimana evaluasi kami terhadap perkembangan perekonomian terkini baik dunia maupun nasional karena ini penting untuk nanti kami bisa menjelaskan poin yang kedua adalah strategi dan program kerja Bank Indonesia apa yang kami lakukan tahun ini dan tahun kedepan karena strategi dan program kerja ini nanti pada akhirnya akan dicerminkan di dalam anggaran Bank Indonesia baik tahun ini maupun tahun kedepan.

Tentu saja nanti kita banyak waktu untuk mendalami lebih lanjut, oleh karena itu perkenankan kami untuk menyampaikan secara pokok-pokoknya. Kami mulai dari yang pertama, di dalam *slide* berikutnya, uraian rinci di dalam paparan kami sudah kami sampaikan juga kepada Bapak Pimpinan dan anggota dewan yang bersangkutan, kami akan menyampaikan pokok-pokoknya.

Kalau kita lihat ekonomi global Bapak Pimpinan dan seluruh anggota dewan, memang betul-betul tahun ini ekonomi dunia itu semakin tidak ramah, betul-betul tidak ramah, dan memang itu menjadi tantangan seluruh dunia termasuk juga apa yang harus kita lakukan di Indonesia. Berbagai faktor yang melatarbelakangi jelas adalah perang dagang. Perang dagang antara Amerika dengan Tiongkok dan seluruh sejumlah negara itu berdampak buruk terhadap ekonomi global maupun kedua negara itu maupun juga negara-negara lain, disamping juga masalah belum jelasnya perundingan antara Inggris dan Uni Eropa dengan Brexit maupun resiko-resiko geopolitik yang lain. Ini perlu kita pahami bagaimana kita harus meresponnya.

Ada tiga hal penting yang memang perlu kita cermati. Yang pertama seperti tadi kami sampaikan, pertumbuhan ekonomi dunia itu semakin lama semakin turun, tidak lagi melambat tapi turun, seperti yang di tabel sebelah kiri, PDP dunia yang tahun 2018 3,6% itu tahun ini hanya tumbuh 3% jadi 3,6 turun ke 3,6%. Sebelumnya kami perkiran di 3,2% tapi dengan *trade war* yang semakin berkepanjangan turun lagi 3%. Tahun depan kalau *trade war* ini terjadi resolusi, terjadi kesepakatan, kami memperkirakan tahun depan yang semula diperkirakan 3,3% kami revisi kebawah ke 3,1%, kalau *trade war* nya berkepanjangan bisa lagi turun lagi tahun depan pertumbuhan ekonomi dunianya.

F-P. GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Interupsi Pak Gubernur. Tapi tren perlambatan itu sudah terjadi lama Pak tapi kenapa BI itu tidak membuat kebijakan moneter untuk meng-*adjust*. Tiga bulan yang lalu saya ketemu sama Ibu deputi senior, saya udah minta turunkan

suku bunga, tapi sampai sekarang 20% suku bunga riil di lapangan bagaimana mau kita menyesuaikan pertumbuhannya Pak.

Makasih Pak itu aja.

GUBERNUR BANK INDONESIA:

Kalau kami nanti diberikan waktu, kami akan jelaskan berbagai respon yang kami lakukan Bapak, dan juga sinergitas antara kami lakukan dengan Bapak presiden, kemudian pemerintah maupun OJK, kalau Bapak memberikan waktu kami barang beberapa menit kami akan menyampaikan respon-respon yang kami lakukan. Nah kalau boleh Bapak dewan kami lanjut.

KETUA RAPAT:

Ya lanjut Pak, saya kira lanjutkan dulu nanti kalau ada pendalaman, ada pertanyaan. Silakan Pak.

GUBERNUR BANK INDONESIA:

Ya, jadi yang pertama, pertumbuhan ekonomi dunia menurun, *synchronize global economic slowdown*, terjadi di dunia, terjadi di Amerika Serikat dan Tiongkok terutama, lihat Amerika Serikat dari 2,9% tahun 2018 turun tahun ini 2,3 tahun depan ada beresiko 1,9%. Tiongkok juga demikian, India juga turun drastis, semua negara memang mengalami penurunan. Tabel sebelah kanan menunjukkan tidak hanya pertumbuhan ekonomi dunia menurun, tapi juga harga komoditas ini menurun, apakah tembaga, batu bara, CPO, maupun yang lain. Kedua hal ini menyebabkan kenapa memang ekspor kita itu melambat dan perlunya kita mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

Yang kedua adalah grafik kanan bawah, bahwa aliran masuk modal asing itu selalu bergejolak, bisa keluar bisa masuk secara mudah. Tahun lalu memang itu yang, tahun lalu yang merah itu ke *emerging market* masih, kemudian tahun lalu adalah turun terjadi pembalikkan modal asing, kemudian agak naik di awal tahun ini tapi karena *trade war* kemudian itu menurun.,

Yang ketiga adalah grafik sebelah kiri adalah sejumlah bank sentral melakukan pelonggaran termasuk yang kami lakukan pelonggaran kebijakan moneter mulai tahun ini.

Tiga hal ini yang memang berdampak terhadap ekonomi Indonesia, pertama pelambatan ekonomi dunia dan menurunnya harga komoditas mengharuskan kita mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru dari domestik. Kedua kita harus memastikan aliran masuk modal asing apakah dalam investasi portofolio maupun penanaman modal asing itu terus berlanjut. Dan yang ketiga memang perlu ada respon yang stimulus dari, tidak hanya dari bank sentral tapi juga dari pemerintah maupun dari fiskal maupun yang lain-lain. Ini yang

sinergitas ini yang terus kami bangun yang sebentar lagi akan kami jelaskan.

Slide berikutnya menunjukkan berbagai kerja keras kita yang kalau kita lakukan sejak tahun lalu sampai sekarang dan juga langkah-langkah yang terus kita lakukan bersama pemerintah dan OJK memang menunjukkan bahwa kinerja ekonomi Indonesia itu relatif baik. Sementara negara-negara lain mengalami pelambatan yang drastis bahkan sejumlah negara itu mengalami resesi, pertumbuhan ekonomi kita di triwulan III kemarin adalah 5,02%, kami perkirakan tahun ini bisa sekitar 5,05%, sedikit dibawah titik tengah kisaran kami yang kami perkirakan sesungguhnya 5-5,4%, sumber pertumbuhannya terutama dua yaitu adalah konsumsi dan yang kedua adalah investasi khususnya investasi bangunan. Konsumsi terutama juga karena program-program sosial pemerintah dan juga rendahnya inflasi sementara investasi bangunan karena pengembangan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah.

Yang menjadi isu adalah bagaimana kita terus mendorong ekspor yang menurun di dalam beberapa triwulan terakhir karena dampak buruk dari ekonomi global dan investasi yang non bangunan yang bagaimana menumbuhkan gairah untuk berinvestasi kedepan.

Tahun depan dengan berbagai respon yang nanti kami akan jelaskan bersama pemerintah kami perkirakan pertumbuhan ekonomi tahun depan itu mendekati titik tengah dari kisaran 5,1-5,5% atau titik tengahnya adalah 5,3%, bersama pemerintah kami berusaha untuk bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi ke arah 5,3% baik mendorong konsumsi, investasi, bangunan non bangunan maupun terus kita meningkatkan ekspor. Daya beli masyarakat relatif terjaga dengan rendahnya dengan rendahnya inflasi, koordinasi kami dengan pemerintah menghasilkan bahwa inflasi harga-harga relatif terkendali di triwulan III yang lalu adalah inflasinya 3,13%, akhir tahun ini kami perkirakan sekitar 3,2% artinya dibawah titik tengah kisaran sasaran kita adalah 3,5%, kami punya sasaran inflasi 2,5 sampai 4,5% atau titik tengahnya 3,5%, *Insyah Allah* akhir tahun ini bisa dibawah titik tengah 3,5%. Tahun depan akan berkisar di sekitar titik tengah yaitu sekitar 3%, kisarannya adalah 2-4%.

Defisit transaksi berjalan kita upayakan bersama pemerintah terkendali di sekitar 2,5 sampai 3% tahun ini dan tahun depan *alhamdulillah* di triwulan III kemarin turun menjadi 2,66%. Nilai tukar sekarang bergerak sekitar 14.000 tercatat disana adalah 14.037 di 31 Oktober, tahun lalu mendapatkan tekanan tapi *alhamdulillah* sejak triwulan IV tahun lalu bisa kami stabilkan dan sekarang bergerak relatif stabil. Tahun ini kisarannya sekitar 14 sampai 14.400, tahun depan sekitar 13.900 sampai 14.400.

Cadangan devisa tahun lalu menurun tapi kemudian dengan pulihnya keadaan sekarang meningkat menjadi terakhir di akhir triwulan III itu adalah 124,3%, sekarang sekitar US\$ 125 lebih miliar, jumlah cadangan devisa ini lebih dari cukup untuk mengantisipasi pembayaran impor, utang luar negeri pemerintah, maupun juga kemungkinan-kemungkinan terjadi pembalikan modal asing. Di perbankan cukup bagus *capital adequacy ratio* atau modal dari perbankan, tinggi

23,48% dan juga *non-performing loan* atau kredit bermasalah secara *gross*-nya adalah 2,6%.

Jadi Bapak Ibu sekalian sinergitas antara pemerintah, Bank Indonesia, OJK, dan berbagai pihak itu bisa mempertahankan stabilitas ekonomi kita dan kita bersama-sama untuk bagaimana melakukan stimulus terhadap ekonomi pertumbuhan ekonomi...(suara tidak jelas)...bagaimana kami bersama-sama pemerintah dan OJK mendorong momentum pertumbuhan ekonomi, baik dari sisi Bank Indonesia, fiskal, maupun juga kebijakan-kebijakan pemerintah maupun juga dari OJK.

Slide berikutnya. Nah oleh karena itu izinkanlah kami untuk menyampaikan yang tadi ditanyakan, bagaimana Bank Indonesia meresponnya bersama pemerintah, apa yang kami lakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mengantisipasi dampak dari sisi global tersebut.

Slide berikutnya. Nah Bank Indonesia mempunyai sejumlah instrumen yang kami punyai untuk dalam waktu yang sama menjaga stabilitas makro ekonomi khususnya inflasi, nilai tukar, tapi pada saat yang sama untuk bisa juga melakukan stimulus terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah mulai tahun ini, kalau tahun lalu kebijakan moneter kami memang untuk stabilitas, tapi mulai tahun ini dengan terjaganya stabilitas, inflasi, nilai tukar, maupun yang lain, seluruh instrumen kami, istilah kami biasanya adalah seluruh jamu yang kami punyai di Bank Indonesia adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, seluruh instrumen kami adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan terjaganya stabilitas baik inflasi, nilai tukar, maupun yang lain-lain.

Di sisi moneter, empat bulan terakhir kami sudah menurunkan suku bunga sebesar empat kali berurutan-turut 100 basis poin dari 6% menjadi 5%, itulah suku bunga yang ditetapkan Bank Indonesia. Ini yang kami sudah turun sehingga diharapkan itu bisa mendorong ekonomi baik dari sisi penyaluran kredit perbankan maupun juga dari permintaan investasi di sektor korporasi. Likuiditas kami juga kendorkan, tahun lalu kami kendorkan kami injeksi likuiditas, tahun ini juga kami injeksi likuiditas kami kendorkan lagi antara lain dengan penurunan giro wajib minimum. Giro wajib minimum itu kami turunkan lagi, tahun lalu kami turunkan, tahun ini juga kami turunkan lagi dengan 50 basis poin atau 0,5%, disamping strategi operasi moneter yang terus melakukan injeksi dari likuiditas.

Itu yang dari sisi moneter, tapi instrumen yang lain-lain kami juga sejak tahun lalu kami arahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, yaitu adalah instrumen makroprudensial, instrumen makroprudensial adalah instrumen yang dimiliki oleh Bank Indonesia bagaimana untuk bisa mengelola penyaluran kredit, likuiditas, maupun juga pembiayaan di dalam ekonomi, biasanya kalau ekonominya lagi *boom* itu kita ketatkan, kalau lagi agak sulit ini kami kendorkan. Instrumennya apa adalah salah satunya adalah *loan-to-value ratio* atau uang muka kredit, uang muka kredit itu kalau lagi kreditnya itu lagi *boom* kita ketatkan, kalau lagi agak sulit ini kami kendorkan, nah tahun lalu kami sudah turunkan kebijakan uang muka untuk kredit properti rata-rata sekitar 5-10%, tahun ini kami

turunkan lagi kebijakan uang muka untuk kredit properti dan juga kredit otomotif supaya bisa mendorong penyaluran kredit kepada properti maupun otomotif. Rata-rata kami turunkan 5% untuk kredit yang properti maupun otomotif, tapi kalau itu berwawasan lingkungan kami turunkan rata-rata 10% sehingga dari tahun lalu sampai sekarang kami sudah mencoba merelaksasi kebijakan uang muka supaya bank-bank itu menyalurkan kredit, disamping juga kebijakan-kebijakan lain apakah memberikan fleksibilitas dari manajemen likuiditas maupun yang lain. Jadi kami memang bank kami dorong untuk pembiayaan ekonomi. Menurunkan suku bunga, injeksi likuiditas, dan juga merelaksasi kebijakan-kebijakan uang muka, itu yang kami lakukan.

Nah di bidang sistem pembayaran tentu saja kami melakukan berbagai program, tahun ini kami membantu pemerintah penyaluran seluruh penyaluran program-program sosial, kalau dulu ada delapan program sosial pemerintah disalurkan sendiri-sendiri. Kami sejak beberapa tahun lalu itu kami membantu melakukan elektronifikasi penyaluran bansos, apakah itu tunai, non tunai, biaya sekolah, biaya kesehatan, yang kemudian bersama perbankan bersama OJK penerbitan kartu kombo dan sehingga penyalurannya lebih efisien lebih tepat sasaran mengenai rekening bank maupun melalui uang elektronik.

Tahun ini *Insya Allah* targetnya sesuai dengan target pemerintah adalah 15,6 juta keluarga, tahun lalu adalah 10 juta keluarga. Ini yang kemudian penyaluran bantuan sosial ini yang kemudian bisa mendukung konsumsi pemerintah khususnya di tingkat menengah kebawah, itu yang kami lakukan. Kami juga melakukan elektronifikasi moda-moda transportasi, apakah tol, apakah berbagai moda transportasi, apakah laut maupun yang lain bersama pemerintah. Kami juga membantu pemerintah daerah melakukan elektronifikasi penerimaan PAD sekarang ada sekitar tujuh sampai dengan sebelas pemerintah daerah yang ikut program sehingga yang semula itu *cash* sekarang menjadi elektronifikasi sehingga PAD-nya itu meningkat sejumlah provinsi maupun kabupaten/kota itu bisa meningkatkan PAD-nya dan juga efisiensi pengeluaran di dalam anggarannya.

Nah tahun ini kami juga menerbitkan visi atau *blueprint* sistem pembayaran Indonesia 2025 bagaimana mendorong ekonomi keuangan digital agar bisa meningkatkan inklusi ekonomi dan keuangan, antara lain adalah standarisasi dari QR atau *Quick Response* versi Indonesia.

Jadi Bapak Ibu sekalian kami terus kampanye ke berbagai daerah, kami mohon nanti dukungan dan sinergitas kampanye-kampanye lebih penggunaan QRIS (QR *Indonesian Standard*) sehingga transaksi di pasar retail termasuk pasar-pasar tradisional, termasuk di kampus-kampus kedepannya lebih banyak menggunakan hp (*cellular phone*) dengan *barcode* atau *code* yang kemudian kita sebut *Quick Response Indonesian Standard*. Kami sudah *launching* 17 Agustus yang lalu dan mulai *mandatory* wajib diterapkan per Januari 2020. Oleh karena itu kami mohon dukungan untuk kampanye hal ini apakah ke pasar tradisional, ke kampus-kampus, maupun ke yang lain-lain supaya memang lebih banyak orang menggunakan QRIS dan QRIS itu betul-betul unggul untuk Indonesia.

Untuk pendalaman pasar keuangan, kami tahun lalu sudah menerbitkan *domestic non delivery forward* untuk stabilisasi nilai tukar, untuk juga berbagai ...(suara tidak jelas) untuk pasar uang disamping kami juga membantu pemerintah untuk pembiayaan infrastruktur dari swasta melalui penerbitan *project bond*, *green bond*, apakah *earning back asset* maupun yang lain. Tahun lalu di Oktober 2018 ditandatangani 21 infrastruktur proyek nilainya US\$ 13,6 miliar yang ...(suara tidak jelas) swasta. Kami sedang berkoordinasi dengan pemerintah saat ini dengan Kemenko, Kementerian Keuangan, dengan OJK, dengan Kemeneg BUMN, untuk pembiayaan infrastruktur dari swasta. Dalam bulan-bulan depan ini kami sedang memfinalisasi untuk berbagai proyek infrastruktur yang selama ini dibiayai oleh APBN dan atau BUMN, agar banyak juga dibiayai oleh swasta khususnya dari dalam negeri.

Kemudian untuk ekonomi keuangan syariah, kami ada program untuk kemudian pemberdayaan ekonomi umat, apakah pesantren maupun yang lain-lain tahun ini adalah sekitar 250 pesantren-pesantren yang kami berdayakan, apakah di bidang *agriculture*, di bidang air, maupun yang lain-lain, demikian juga membangun kampanye halal kemudian mengembangkan zakat wakaf bersama BWI maupun Baznas maupun sejumlah universitas juga kami juga menstandarisasi membangun standarisasi pengembangan kurikulum ekonomi keuangan syariah.

Bu Indah tadi menyampaikan, kami setiap tahun itu ada empat *event* besar, yang tiga itu di skala wilayah yang kita sebut Festival Ekonomi Syariah terakhir ada di Surabaya sukses dimana ini tempat semua pengembangan ekonomi syariah kami lakukan. Nah kami juga mohon dukungan dan mengundang Bapak Ibu sekalian, kami minggu ini mengadakan satu *event* internasional yaitu yang kita sebut International Syariah Expo (ISEF) di Jakarta yang *Insyah Allah* hari rabu akan dibuka oleh Bapak wakil presiden, kami mengundang Bapak Pimpinan dan seluruh anggota untuk bisa ikut hadir menyaksikan bagaimana ISEF ini menjadi panggung bersama untuk bersama-sama mengembangkan ekonomi keuangan syariah kedepan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru kedepan.

Ini adalah berbagai *event* yang kami lakukan sehingga Bank Indonesia tidak hanya fokus kepada stabilisasi nilai tukar dan inflasi saja, tapi juga melakukan sinergitas dengan pemerintah untuk sama-sama bisa memajukan ekonomi karena kemajuan ekonomi juga akan memudahkan kami dalam melaksanakan tugas pengendalian stabilitas. Itu yang kami lakukan.

Slide berikutnya. Nah sinergitas itu kami lakukan dengan pemerintah dalam berbagai hal. Bapak Ibu tau bagaimana untuk pengendalian inflasi kami ada forum tim pengendalian inflasi di pusat maupun tim pengendalian inflasi di daerah, termasuk pengembangan kluster-kluster pangan disana apakah cabai, beras, bawang, bawang merah, bawang putih, di berbagai daerah yang *alhamdulillah* dengan dukungan Bapak Ibu semua dalam PSBI, PSBI kami juga kami arahkan untuk pengembangan kluster-kluster pangan disamping juga pengendalian inflasi melalui TPI dan TPID, kami juga ikut bersama pemerintah perbaikan struktur

perekonomian mendorong infrastruktur, mendorong investasi, mendorong pariwisata, mendorong industri, maupun juga pengembangan ekonomi keuangan digital. Sinergitas ini yang memang bersama-sama memajukan ekonomi dan juga memudahkan stabilitas. Untuk stabilitas sistem keuangan, koordinasi yang erat melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang diketuai Ibu menteri, anggotanya kami sendiri, ketua OJK, dan ketua LPS. Disamping juga bilateral koordinasi antara BI-OJK dengan BI-LPS.

Untuk pendalaman pasar keuangan, seperti tadi kami sampaikan, ada forum koordinasi pendalaman pasar keuangan yang tidak hanya mengembangkan pasar uang tapi bagaimana kita ikut membiayai infrastruktur dari swasta.

Yang kelima tentu saja adalah pengembangan ekonomi keuangan digital khususnya dari Bank Indonesia adalah sistem pembayaran, sementara dari OJK mengenai *fintech* maupun yang lain-lain.

Berikutnya. Nah oleh karena itu sejak saya menjadi Gubernur Bank Indonesia itu memang visi kami sesuaikan, kalau yang sebelumnya hanya fokus kepada stabilitas, visi yang baru adalah menjadi bank sentral yang berkontribusi secara nyata terhadap perekonomian Indonesia dan terbaik diantara negara *emerging market*. Tentu saja kami akan fokus kepada mandat kami, inflasi, stabilisasi nilai tukar, itu adalah fokus kami dan mendukung SSK. Tapi tentu saja kami kan tidak bisa bekerja sendiri. Mengendalikan inflasi tidak cukup dari moneter, tapi masalah ketersediaan pangan, pengembangan kluster bawang, cabai, beras, dan segala macam itu penting, sehingga program-program ke arah sana juga dilakukan. Mengendalikan nilai tukar tidak cukup dengan suku bunga maupun intervensi. Mengendalikan defisit neraca perdagangan barang dan jasa itu penting sehingga kami kenapa turut mendukung ekspor *manufacture*, pariwisata, maupun yang lain bersinergi dengan pemerintah. Tugas dari pemerintah tapi kami memfasilitasi memberikan kajian maupun juga dukungan koordinasi maupun yang lain baik dari kantor pusat maupun melalui 46 kantor-kantor kami di seluruh Indonesia.

Demikian juga maupun yang lain-lain di dalam ekonomi keuangan digital. Bantuan sosial seperti tadi kami sampaikan kami bisa saja tidak ikut tapi elektronifikasi akan sangat bagus kalau bisa mendukung penyaluran bantuan sosial. Ini yang kami lakukan, sinergitas ini yang kami wujudkan di dalam visi yang baru ini dan tentu saja didukung oleh tiga kebijakan kami, kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran, dan pengelolaan uang rupiah, dan sinergitas dibawah baik internasional, ekonomi keuangan syariah, pendalaman pasar keuangan, maupun ekonomi keuangan daerah.

Nah visi dan juga pokok-pokok kebijakan ini yang kami tuangkan *slide* berikutnya adalah program-program strategis. Inilah 12 program strategis di dalam mewujudkan strategi maupun juga visi Bank Indonesia tadi. 12 program strategis yang tidak hanya mencakup pelaksanaan tugas-tugas Bank Indonesia tapi juga sinergitas yang dilakukan oleh Bank Indonesia di dalam berbagai aspek tadi.

Sebagai contoh di bidang moneter, kalau dulu lebih hanya nomor satu

memperkuat efektivitas kebijakan moneter untuk pengendalian inflasi, kami juga sekarang nomor dua adalah program strategis nomor dua adalah sinergi dari kebijakan Bank Indonesia dengan fiskal maupun pemerintah untuk bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengelola defisit transaksi berjalan.

Demikian juga di dalam stabilitas sistem keuangan nomor tiga adalah tugas kami sendiri, tapi nomor empat sinergitas dengan pemerintah dan OJK. Nomor lima adalah tugas kami di sistem pembayaran, tapi juga untuk nomor enam adalah mendukung ekonomi keuangan digital. Demikian nomor tujuh, nomor delapan, nomor sembilan, adalah di bidang pendalaman pasar keuangan, ekonomi keuangan syariah, maupun internasional.

Sementara 10, 11, 12 adalah bagaimana dukungan transformasi organisasi dan SDM di dalam mendukung strategi, nomor 11 adalah sistem informasi, nomor 12 adalah tata kelola dan manajemen resiko. 12 program strategis ini yang kami sudah rumuskan, dan di dalam 12 program strategis ada program kegiatan utama dan program-program yang tentu saja nanti akan memerlukan anggaran-anggaran yang diperlukan untuk mendukung program kegiatan utama strategi maupun dalam pencapaian tugas-tugas Bank Indonesia.

Nah itulah yang ingin kami sampaikan bagian yang kedua, dan dengan berkenan Bapak Pimpinan dan anggota kami akan menyampaikan implikasinya terhadap anggaran operasional Bank Indonesia baik yang evaluasi untuk 2019 maupun yang lain.

Seperti tadi kami sampaikan berbagai dinamika di tingkat global, domestik, yang telah kami sampaikan sebelumnya mewarnai bagaimana kita menyusun strategi dan program dan realisasi dan Prognosa ATBI 2019 yang ingin kami sampaikan sebelum nanti kami menyampaikan RATBI-nya untuk 2020.

Kami mulai dari 2019. Di dalam kita melakukan Prognosa untuk penerimaan maupun pengeluaran operasional, sampai dengan Oktober 2019 untuk penerimaan operasional 2019 realisasi anggaran penerimaan telah mencapai 33.553.000.000.000 atau sebesar 123,59% dari ATBI. Jadi 23,6% lebih tinggi dari yang dianggarkan di tahun 2019, dan di Prognosa-kan di akhir tahun nanti adalah 33,78% lebih tinggi dari anggaran. Realisasi penerimaan yang lebih tinggi ini terutama berasal dari hasil pengelolaan aset valas, pengelolaan cadang devisa, yang mencapai 33,5 triliun atau 23 hampir 24% dari ATBI dan di Prognosa-kan akan mencapai 34% lebih tinggi dari yang direncanakan atau 133,9%. Kondisi tersebut sejalan dengan prospek dan stabilitas nilai tukar dan meningkatnya cadangan devisa yang kita miliki.

Untuk kemudian mengenai Prognosa pengeluaran operasional 2019, realisasi pengeluaran sampai dengan Oktober 2019 mencapai 7,1 triliun atau 71,74 7,4% dari ATBI, tapi pada akhir tahun kami Prognosa-kan bisa mencapai 95,4%

F-PDIP (INDAH KURNIA):

Izin Pimpinan, izin sedikit mumpung sampai disini, Pak Perry supaya tidak berlanjut lebih luas. Mungkin sedikit dijelaskan kepada kami karena ini merupakan satu komponen yang terbesar sebelumnya. Ya, dari penerima, dari penerimaan Bank Indonesia yaitu di hasil pengelolaan aset valas, itu sedikit saja Pak Perry dijelaskan kepada kami agar tidak terjadi misalnya seolah-olah kami menganggap darimana ya hasil penerimaan BI terbesar, apakah seperti *money changer* gitu, jual beli valas, kan tidak. Makanya untuk itu sedikit saja dijelaskan kepada kami hasil pengelolaan aset valas seperti apa.

GUBERNUR BANK INDONESIA:

Terima kasih Bu Indah, dengan seizin Pimpinan kami sampaikan ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa hasil pengelolaan aset valas itu meningkat lebih tinggi dari yang kami anggar. Sebagaimana diketahui Bapak Pimpinan dan Ibu-Ibu anggota Komisi XI, Bank Indonesia sesuai dengan undang-undang adalah pengelola cadangan devisa negara, dan oleh karena itu kami secara berhati-hati untuk menjamin likuiditasnya agar pemerintah sewaktu-waktu menggunakan cadang devisa kami punyai dan kemudian kami juga mencari imbal hasil, hasil keuntungan yang bagus.

Pertama Bu Indah memang karena cadangan devisanya meningkat, seperti tadi sudah saya sampaikan, sekarang adalah yang akhir Oktober US\$ 124,6 miliar, sekarang adalah, bahkan sekarang US\$ 126 miliar. Dengan cadangan devisa yang lebih besar sehingga ada komponen dari cadangan devisa yang kami lebih arahkan untuk mendapatkan imbal hasil yang lebih tinggi. Itu adalah faktor yang pertama.

Faktor yang kedua adalah bagaimana kami memperkuat strategi dan kebijakan investasinya. Tentu saja kami tetap mengutamakan likuiditas, kebutuhan pemerintah untuk pembayaran impor, utang, maupun yang lain-lain, tapi tentu saja dengan jumlah cadang devisa yang lebih tinggi semakin banyak juga yang kami bisa lakukan untuk mencari imbal hasil, antara lain kami tempatkan di dalam obligasi pemerintah maupun supranasional yang memerlukan imbal hasil, demikian juga kami juga mencari juga penerbitan apakah sukuk yang kemudian bisa memberikan imbal hasil sekaligus juga memperbanyak aset-aset valas kami yang syariah supaya kami bisa melakukan pengelolaan moneter syariah, dan kami juga mulai juga mencari imbal hasil yang lebih tinggi melalui *Mortgage-Backed Aseet* maupun *Corporate Bond* yang memang tapi tetap pruden Bu Indah, pruden tetap penting tapi mencari *spread* yang lebih tinggi. Itulah faktor kedua dari imbal hasil, tentu saja nanti di dalam panja penerimaan banyak waktu untuk kami bisa menjelaskan lebih detail angka-angkanya secara detail, faktor-faktornya tentu saja kami akan siap untuk bisa memberikan penjelasan lebih detail.

Demikian Bapak Pimpinan, kalau boleh kami bisa teruskan untuk pengeluaran. Tadi mengenai penerimaannya, untuk pengeluaran seperti tadi kami sampaikan, realisasi sampai dengan Oktober 2019 mencapai 7,1 triliun, tetapi pada akhir tahun 2019 kami yakini akan bisa mencapai 95,4% dari ATBI, terutama komponen terbesar adalah pengeluaran gaji dan penghasilan lainnya yang tercatat Rp 2,834 triliun atau 80% dan kami perkirakan akan mencapai 94,1% dari ATBI. Yang lain-lain adalah terkait dengan manajemen sumber daya manusia 1,311 miliar atau 56% dan kemudian kami prognosakan 90,4%. Ini sejalan dengan berbagai kebijakan-kebijakan kami yang untuk mendukung transformasi kebijakan organisasi perlunya bagaimana kami melakukan berbagai kebijakan-kebijakan di bidang sumber daya manusia khususnya untuk *training, upgrading skill*, maupun juga berbagai program-program kepemimpinan yang kami lakukan.

Nah selanjutnya juga yang terkait juga dengan realisasi program sosial Bank Indonesia, sebagaimana kami sampaikan dan Bapak Ibu ketahui, program sosial Bank Indonesia memang kami arahkan untuk bagaimana tidak hanya berkaitan dengan sosial, tapi juga untuk mendorong pendidikan dan juga untuk bagaimana pemberdayaan sektor riil dan UMKM. Kami punya program-program kluster mengenai pangan, program-program UMKM, maupun yang lain-lain, kami di UMKM kami punya 898 UMKM yang kebinaannya kami dan mereka itu sangat bagus-bagus setiap tahun ada karya kreatif Indonesia yang tahun ini *alhamdulillah* dibuka oleh bapak presiden dan dihadiri oleh ibu negara yang merupakan keberhasilan Bank Indonesia di dalam UMKM termasuk juga tadi program untuk ekonomi keuangan syariah. Nah hingga Oktober 2019

F-P. NASDEM (H. RUDI HARTONO BANGUN, S.E., M.A.P.):

Izin Pimpinan, saya mau nanya. Ketua ini mau nanya, jadi begini Pak Gubernur, saya ingin tau manajemen sumber daya manusia itu kan 2,3 triliun, begitu kan, jadi lalu apa saja ini Pak, jadi saya ingin tanya Bank Indonesia ini tugasnya kan tidak lagi seperti dulu, kalau dulu sebelum pisah sama OJK, pengawasan asuransi, bank, dan segalanya industri keuangan. Ini BI sekarang sudah sedikit kerjanya Pak, banyak ke OJK, jadi kalau dibanyakin sumber daya manusianya itu mau apa *goal* nya Pak, tujuannya gitu, segitu besar. Sementara kalau saya lihat di daerah, BI itu kerja sama sama pemda dalam apa namanya itu Pak lupa saya Pak, TPID ya, panjang itu Pak, nah itu kan yang utama, menstabilisasi harga. Jadi kenapa gak ke arahkan kesitu Pak, kenapa di sekolahkan lagi itu orang BI nya, mau tugas apa lagi yang, sementara sudah ringan tugasnya Pak, itu yang pertama Pak dan ini saya pingin penjelasannya Ketua.

Terima kasih.

F-PAN (AHMAD NAJIB QUDRATULLAH, S.E.):

Pimpinan saya pikir jangan ada dulu tanya jawab Pimpinan, sebelah sini Pimpinan, Ahmad Najib. Saya usul dalam rapat kali ini berikan kesempatan pemaparan secara tuntas jangan dulu terpotong, begitu Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Betul. Jadi kita sepakat bahwa Pak karena waktunya terbatas Pak Gubernur ada ratas, Bapak menyelesaikan semuanya, nanti baru pendalaman kita lakukan oleh deputi yang lain, silakan Pak. Kecuali kalau interupsi yang ada kaitannya seperti yang disampaikan. Silakan Pak lanjutkan Pak.

GUBERNUR BANK INDONESIA:

Siap Bapak Pimpinan. Ada tiga faktor kenapa Bank Indonesia untuk anggaran manajemen sumber daya manusia, itu sebesar yang tadi sampaikan.

1. Bahwa pemisahan ke OJK adalah lebih terkait dengan pengawasan dan pengaturan mikroprudensial dari bank per bank, dari individu ke individu. Sesuai dengan undang-undang, Bank Indonesia mempunyai mandat baru yang disebut adalah kebijakan makroprudensial. Kebijakan makroprudensial itu apa.
 - a. Bagaimana kita melakukan kebijakan dalam pengelolaan pembiayaan termasuk kredit yang tadi.
 - b. Kami juga melakukan *surveilans* terhadap stabilitas sistem keuangan. *Surveilans* tidak kesehatan bank per bank, tapi melihat bagaimana secara sistem itu kami lakukan
 - c. Tentu saja kami juga mendukung di dalam pengembangan akses keuangan. Nah semuanya itu dibawah koordinasi komite stabilitas sistem keuangan, maupun juga koordinasi bilateral BI dengan OJK maupun BI dengan Kementerian Keuangan.
Nah mandat baru ini tentu saja memerlukan SDM yang dulunya itu adalah menangani permasalahan mikroprudensial. Dulu menangani pengawasan mikroprudensial, setelah mikroprudensial dipindahkan ke OJK, kawan-kawan SDM ini yang sekarang menangani pengawasan mengenai sumber daya manusia. Itu faktor pertama.
2. Seperti tadi juga telah disampaikan, banyak kebijakan maupun pelaksanaan tugas Bank Indonesia tidak bisa dilakukan atau berhasil kalau kita tidak melakukan sinergitas. Seperti tadi untuk pengendalian inflasi perlu ada TPID maupun TPI, dan oleh karena itu *human resource* atau SDM itu yang melakukan pekerjaan-pekerjaan mengenai TPID.
3. Terkait juga mengenai 46 kantor-kantor kami melakukan *assessment*

mengenai kebijakan ekonomi daerah, kenapa di berbagai daerah 46 kantor-kantor kami selalu menjadi mitra pemda, bagaimana *assessment* ekonomi proyeksi dan kebijakan-kebijakan apa kemudian menjadi sinergitas. Nah ini yang kemudian baik dari jumlah maupun dari sisi kualitas yang terus kami *upgrade* karena memang tuntutan-tuntutan itu yang ...

Termasuk yang terakhir adalah bagaimana mengembangkan ekonomi keuangan digital melalui sistem pembayaran, mandat kami sistem pembayaran diarahkan untuk mendukung ekonomi keuangan digital.

Ini beberapa faktor, lagi-lagi tentu saja nanti di dalam panja kami akan lebih banyak waktu untuk menjelaskan secara detail mengenai angka-angka maupun program-programnya.

Demikian Bapak Pimpinan, kalau boleh kami lanjutkan.

F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.):

Izin Pimpinan, enggak, interupsi. Ya memang nanti pendalaman di panja, cuma memang Bank Indonesia melakukan kebijakan makroprudensial atau tugas makroprudensial itu payung hukumnya belum kuat, karena ini hanya tercantum di dalam penjelasan undang-undang OJK, itu masuk dalam penjelasan. Sehingga inilah kalau memang itu menyediakan tugas Bank Indonesia harus kita perkuat dengan revisi undang-undang Bank Indonesia, sehingga tidak masuk dalam *grey area*. Saya kira ini penting ya ini beberapa kali kita melakukan pertemuan karena kita berdasarkan konstitusi gitu ya, dan menurut saya tidak kuat kalau hanya masuk di dalam penjelasan undang-undang OJK, poinnya sebenarnya disitu. Nanti di dalam pendalaman, tapi ini jelas sekali membutuhkan revisi undang-undang Bank Indonesia.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya udah kita masukkan di dalam prolegnas nanti Pak.

Silakan Pak lanjut Pak.

GUBERNUR BANK INDONESIA:

Siap. Kalau boleh Bapak Pimpinan kami akan beralih untuk bagaimana rancangan mengenai RATBI 2020. Tadi kami sudah jelaskan realisasi maupun prognosa anggaran operasional BI untuk tahun 2019, kalau diperkenankan kami dalam sisa waktu yang tersedia kami akan menyajikan rencana ATBI 2020 yang telah kami sampaikan kepada Bapak Pimpinan dan anggota untuk mohon persetujuan.

Yang pertama, kami menyusun RATBI 2020 itu dengan menggunakan asumsi-asumsi makro yang sama dengan asumsi-asumsi makro di dalam APBN 2020, apa itu, khususnya yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi 5,3%, inflasi 3,1%, dan rata-rata nilai tukar Rp 14.400 per US\$. Asumsi-asumsi ini yang kami lakukan. Nah berdasarkan asumsi itu kami menyusun proposal anggaran operasional 2020 yang kami sampaikan di *slide* nomor 16 bahwa dengan asumsi makro tersebut serta dengan mempertimbangkan strategi dan program kerja Bank Indonesia yang tadi kami sudah sampaikan, postur anggaran penerimaan operasional tahun 2020 sebesar Rp 31,994 triliun. Sedangkan anggaran pengeluaran operasional tahun 2020 sebesar Rp 11,147 triliun sebagaimana terlihat dalam tabel di *slide* nomor 16.

Nah untuk rencana penerimaan operasional tahun 2020 di *slide* 17, anggaran penerimaan operasional tahun 2020 mengalami kenaikan 17,84% dari ATBI 2020, terutama berasal dari penerimaan hasil pengelolaan aset valas yang disebabkan, tadi kami sampaikan, jumlah devisa yang lebih tinggi, kemudian bagaimana kebijakan investasi kami untuk melakukan optimalisasi strategi pengelolaan aset valas atau cadangan devisa yang kami sampaikan tadi.

Sementara untuk rencana pengeluaran operasional tahun 2020 sebagaimana kami sampaikan di *slide* 18 mengalami kenaikan sebesar 12,56% dari ATBI 2019, rinciannya antara lain gaji dan penghasilan lainnya sebesar 3746 miliar us, rupiah mohon maaf. Kemudian manajemen sumber daya manusia Rp 2,946 triliun, logistik 1411 miliar US\$, rupiah mohon maaf. Penyelenggaraan operasional kegiatan pendukung 1291 miliar rupiah, program sosial Bank Indonesia dan pemberdayaan sektor riil dan UMKM sebesar Rp 520 miliar atau mengalami kenaikan sebesar 10,6% dari prognosa atau dari ATBI 2019, pajak 961 miliar, cadangan anggaran 272 miliar. Itu adalah prognosa, mohon maaf rancangan anggaran tahunan Bank Indonesia operasional untuk tahun 2020 baik dari sisi penerimaan maupun dari sisi pengeluaran dan rincian-rinciannya.

Bapak Pimpinan dan anggota dewan yang terhormat, demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan terkait dengan evaluasi anggaran operasional Bank Indonesia tahun 2019 dan rencana anggaran operasional BI tahun 2020. Akhirnya sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia Pasal 60 Ayat 3 dan sejalan dengan upaya untuk mewujudkan tata kelola yang baik serta untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Bank Indonesia, besar harapan kami agar kiranya Bapak Pimpinan dan anggota dewan yang terhormat berkenan menerima evaluasi pelaksanaan anggaran operasional 2019 dan penjelasan mengenai rencana anggaran operasional BI untuk tahun 2020.

Demikian terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Pak ini ada keputusan rapat dewan gubernur BI 23-24 Oktober yang ada dalam paparan Bapak gak perlu disampaikan?

GUBERNUR BANK INDONESIA:

Ini tadi yang tadi kami sampaikan sekaligus menjawab tadi. Ini ada beberapa kebijakan kami untuk bersama pemerintah mendukung momentum pertumbuhan ekonomi, inilah keputusan rapat dewan gubernur yang terakhir yaitu pertama menurunkan suku bunga yang keempat kali menjadi 5% setelah sejak Juli jadi empat kali. Kemudian totalnya 1% menjadi 5%, kemudian juga injeksi likuiditas, relaksasi makroprudensial maupun juga di bidang sistem pembayaran. Dan kedepan kami juga melihat ada beberapa ruang untuk memanfaatkan kebijakan yang lebih akomodatif, tentu saja akan data dependen, kami akan mencoba mencermati perkembangan ekonomi domestik dan global. Dan terakhir tentu saja koordinasi, sinergitas kami terus lakukan dengan pemerintah dan OJK untuk bersama-sama mempertahankan stabilitas ekonomi, mendorong permintaan domestik, meningkatkan ekspor pariwisata maupun aliran masuk modal asing khususnya yang terkait dengan penanaman modal asing.

Demikian Bapak Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih kami sampaikan kepada Gubernur Bank Indonesia yang telah memberikan pemaparan mengenai RATBI dan program strategis program kerja 2019-2020.

Selanjutnya disini di meja Pimpinan sudah ada 14 penanya, mungkin sambil jalan kita sampaikan, kalau misalnya Pak Gubernur sudah waktunya harus segera ratas tinggal minta izin diserahkan kepada para deputy yang terkait.

Mulai dari sebelah kiri dulu kami persilakan Pak Ramson Siagian. Silakan Pak Ramson.

F-P. GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Makasih Pak Ketua.

Ini langsung aja Pak Gubernur, sesudah penjelasannya agak lumayan juga sebenarnya yang dilakukan oleh BI, saya tidak persoalan soal tadi ada abu-abu tetapi bagaimana strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, karena itu akan memberikan perluasan lapangan kerja kepada rakyat, artinya kalau pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Hanya memang kalau disini saya lihat kelemahan dari sisi pemerintah, kebijakan non fiskal sama kebijakan fiskalnya kurang bisa meng-*adjust*, kebijakan non fiskal seperti paket-paketnya menteri

perekonomian sebelumnya saya lihat kurang efektif, itu kebijakan non fiskalnya, kalau itu juga tidak disesuaikan artinya apa yang dilakukan oleh BI juga kurang efektif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Mudah-mudahan menko perekonomian sekarang, kebetulan juga teman dulu di Komisi VII ketua umum Golkar Pak Airlangga, bisa membuat kebijakan-kebijakan non fiskal yang memang bisa meng-*adjust*, jadi bukan asal-asal artinya betul-betul komprehensif sehingga para pelaku ekonomi bisa menggerakkan perekonomian, bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena selama lima tahun ini 2016 saya sudah prediksi bahwa tidak akan lewat dari 5% karena saya lihat dari kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah dan juga BI saat itu, tetapi tahun terakhir ini berarti BI sudah melakukan penyesuaian (*adjust*).

Terus yang kedua ini peningkatan pengelolaan aset bisa memprognos 31,8 triliun, itu apa dilihat dari bahwa nanti akan terjadi gelombang apa namanya, dengan perlambatan ekonomi ini kan antara lain soal mata uang kan akan terjadi gejolak, apa itu salah satu variabel yang mempengaruhi sehingga bisa membuat prognos seperti itu atau volume dari penggunaan valas. Itu nanti tolong dijelaskan gitu.

Terus yang berikutnya, saya mengharapkan bahwa BI juga bekerja sama dengan OJK agar suku bunga yang sudah diturunkan oleh BI tetapi di lapangan oleh bank pelaksana bisa betul-betul turun, karena misalnya dari sisi *demand*, sekarang suku bunga riilnya 20% baik bank negara juga 20 19 18%. Bagaimana orang yang berpenghasilan pas-pasan mau meningkatkan permintaan kalau gajinya ini artinya kalau bunganya terlalu tinggi. Tetapi kalau bunganya tepat artinya ekuilibriumnya oke, dia dengan penghasilan tertentu dia akan berani membeli kredit. Begitu juga dari sisi *supply*, orang mau investasi misalnya mau angsur mesin apa segala kalau bunganya tidak terlalu tinggi kan dia bisa kompetitif, tetapi memang itu tadi harus disesuaikan dengan kebijakan non fiskal sehingga mereka itu bisa diarahkan untuk bisa berkompetisi di paling tidak di pasar domestik dulu sehingga barang-barang impor tidak menguasai pasar domestik sehingga tadi itu neraca pembayaran kita juga neraca perdagangan kita defisit. Nah ini yang satu harus sinkron gitu.

Jadi saya kalau melihat dari awal dari dulu bahwa kebijakan moneter, kebijakan fiskal, sama kebijakan non fiskal itu harus seirama gitu, tapi kalau ini tidak seirama ada pincang, nah target pertumbuhan ekonomi yang disampaikan oleh Presiden Jokowi waktu kampanye dulu gak tercapai, kalau sekarang saya udah ikut mendukung Pak Gubernur. Kebetulan dulu waktu kita ketemu disini saya masih PDI-Perjuangan, tetapi sejak 14 saya kan sudah di Gerindra, tadinya oposisi kan. Jadi saya memang kebagian oposisi, saya dulu di PDI-Perjuangan oposisi nyerang kebijakan Pak SBY. Ini sekarang *alhamdulillah* sudah tidak oposisi, jadi saya rada tenang sedikit, jadi bisa berkawan makanya sekarang saya pakai batik pun sudah merah gitu, ah itu jadi kekompakan gitu.

Jadi tentunya saya akan berupaya berkontribusi pemikiran-pemikiran strategis agar programnya Pak Jokowi bisa jalan, artinya efektif. Sementara itu aja.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Terima kasih yang terhormat Pak Ramson. Selanjutnya yang terhormat Ibu Vera.

F-PD (Hj. VERA FEBYANTHY, M.Si.):

Pimpinan langsung saja karena kita mempersingkat waktu, Gubernur BI akan ada ratas. Saya hanya dari tadi saya coba membuka atau membaca kembali bahan presentasi Bapak, namun saya tidak mendapatkan mengenai visi dan misi bank sentral yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian Indonesia. Yang saya ingin tanyakan, karena kan Indonesia ini sebagai negara *emerging market* Pak, saya ingin mendapatkan, karena kita dalam rangka ingin melakukan pembahasan terhadap rencana anggaran BI, pertanyaan saya hanya simpel saja Pak, capaian dari indeks *key performance* atau *performance based budgeting* Bank Indonesia sebagai bank sentral yang kita tau memiliki visi menjadi bank sentral yang mempunyai kontribusi nyata terhadap perekonomian Indonesia, tolong saya diberikan jawaban mengenai KPI tersebut. Karena sebelum saya membahas rencana kerja ATGBI atau ATBI, kita perlu mengetahui pencapaian Bank Indonesia, ini bagian dari fungsi pengawasan Bank Indonesia, Komisi XI terhadap BI.

Yang kedua tadi saya mencoba melihat tadi ada tantangan menghadapi defisit transaksi berjalan. Namun dalam rencana kerja BI tidak tercermin bauran kebijakannya Pak, yang terkait ini misalnya Bank Indonesia mampu menarik devisa hasil ekspor di dalam negeri, seperti apa fundamental yang tidak tercermin dalam ATBI itu saya ingin mendapatkan jawabannya, mungkin nanti Bapak bisa serahkan kepada para deputi karena ini sangat bisa kami mulai melakukan pembedahan atau pembahasan terhadap anggaran tahunan Bank Indonesia.

Yang ketiga mengenai kepemilikan pasar saham, pasar saham asing ini sekarang kita tau di pasar keuangan mendominasi hampir kurang lebih 50% Pak, dan SBN itu 37% pada akhir semester II. Kemarin kita mendapatkan informasi pada raker dengan Menteri Keuangan. Hari ini tentunya kita bergembira karena memberikan dampak positif sebagai sumber pendanaan perekonomian Indonesia. Namun dominasi kepemilikan asing ini juga harus hati-hati dapat menimbulkan kerentanan terhadap sistem negatif yang berpotensi terhadap pasar. Nah ini kira-

kira stabilitas apa Bank Indonesia akan meluncurkan program tersebut dalam rangka menjaga pasar keuangan ini yang sekarang didominasi, asing itu mendapatkan dominasi yang tertinggi, ini yang saya ingin mendapatkan jawabannya dari Pak Perry.

Karena kita tau saat ini perekonomian Indonesia tadi Bapak bilang bahwa angka pertumbuhan cukup baik dan pertumbuhan itu sangat baik 5%, apakah ini bisa dikatakan bagus, tentu jawabannya bagus. Namun Indonesia saat ini kan tidak tau tidak hanya tumbuh sebesar angka 5%, dulu kita pernah mencapai angka 6% disaat krisis *supreme mortgage* dan krisis Yunani pada tahun 2008-2010.

Nah jika terus seperti ini Pak tentunya akan terdapat resiko yang cukup besar untuk kita semua, ini kita akan menjadi tua sebelum kaya. Nah kalau ini seperti kayak begini kira-kira apa yang Bapak bisa lakukan. Jadi kalau angka terus 5,2 atau 5% kita akan menjadi tua, jadi kita ini akan tua baru kaya nanti setelah tua. Nah ini kan harus diantisipasi terhadap langkah-langkah pertumbuhan nanti kalau kita akan bahas di dalam asumsi makro atau kebijakan asumsi dalam belanja APBN 2020 nanti *eh* APBN berikutnya itu ada beberapa komponen mengenai pertumbuhan, angka pertumbuhan, suku bunga, dan yang ingin saya tanyakan adalah masalah angka pertumbuhan, kalau dalam kondisi Indonesia saat ini 5% dinilai cukup baik.

Nah persoalannya adalah kalau sampai terus seperti ini kita ini kayak saya usia saya udah mau mendekati angka 50 saya gak akan kaya-kaya Pak, tua saya. Tapi kalau kita misalnya saya tidak bekerja sebagai anggota DPR, jadi dari generasi yang 50 keatas dia akan tua dulu baru menikmati kekayaan, kalau kita hanya dalam makan waktu dua periode ini pemerintahan Jokowi itu 5 terus stagnan. Kalau di Amerika atau negara berkembang 3 itu juga cukup baik, nah itu pertanyaan saya.

Kira-kira relaksasi apa atau prognosa apa yang akan Bapak proyeksi di dalam pembahasan anggaran atau APBN 2021 nanti yang akan kita bahas bersama-sama dengan Menteri Keuangan. Biasanya kan Bapak kita diminta pendapat mengenai angka pertumbuhan dan suku bunga, tentunya tidak akan jauh berbeda dengan angka yang akan disampaikan oleh pemerintah. Tapi kan Bapak bisa memberikan masukan kepada pemerintahan Jokowi gitu sedikit berbeda gapapa Pak gak usah gengsi karena memang zaman dulu pemerintahan SBY itu angka pertumbuhan aja bisa berbeda dengan usulan pemerintah, sangat berbeda, karena dengan alasan-alasan tertentu. Bapak harus bisa memberikan masukan yang *out of the box* gitu loh Pak, jangan hanya Bapak ini bukan pemerintah, Bapak itu adalah bagian dari pemerintahan tapi Bapak bukan pemerintah, jadi usulan itu baik tentunya kalau kita bisa mendapatkan masukan atau usulan dari BI itu agak sedikit berbeda. Jadi warnanya jangan sama, misalnya kemarin kita udah berhari-hari rapat dengan pemerintah itu alasannya faktor ekonomi global, dan lain-lain, brexit, belum juga kita bicara mengenai nanti berdampak terhadap rencana *impeachment* terhadap Trump itu dalam waktu

dekat ini sudah bergulir terus, dan itu menjadi satu *excuse* dari pemerintah berkaitan dengan angka pertumbuhan yang memang tidak bisa mendekati di angka 6.

Saya ingin mendapatkan masukan tersebut di sisi yang lain, kita beda lagi persoalan ini. Saya kira yang menjadi *concern* saya mengenai KPI dulu Pak karena kita akan mulai membahas mengenai ATBI 2020.

Yang terakhir Pimpinan usulan saya, ketika kita membahas ATBI, tolong Pak jangan *last minute*, karena saya tiga periode disini selalu seperti itu, anggaran tahunan Bank Indonesia itu selalu diawali rapatnya mulai bulan November, sudah mendekati masa reses atau masa penutup tahun. Kalau bisa kita bikin dulu di awal misalnya kemarin agak terlambat Pimpinan harusnya dari bulan Oktober kita sudah mulai melakukan pembahasan. Untuk tahun berikutnya kalau bisa di September Pimpinan kita lakukan pembahasan, karena kita gak punya waktu, membedah anggaran tahunan BI ini cukup besar, lebih besar daripada mitra kerja Komisi XI di Kementerian Keuangan maupun Bappenas dan lain-lainnya.

Jadi memang perlu ada pembedahan yang sangat *depply*. Jadi siklus ini jangan normatif, tahun ke tahun saya udah hampir, saya lima tahun *off*, saya pikir ada perubahan gitu loh, ternyata sama saja gitu *last minute last minute*. Pernah dulu sampai kita mendapatkan di gubernur yang lalu karena Pak Agus Marto itu sangat keras, dia minta tanggal 24 itu sudah selesai padahal kita kan sudah hari natal pada saat itu. Jadi tolong ini jangan lagi, saya minta tahun depan 2020 ketika kita akan membahas 2021 minimal September itu kita sudah melakukan pembahasan, *exercise* dulu seperti Kementerian Keuangan itu ketika membahas anggaran APBN itu mereka melakukan *exercise*. Karena kan ini memang gak ada siklusnya berbeda dengan pemerintah, Bank Indonesia ini.

Jadi nanti kita formulasikan seperti apa yang bisa kita mempunyai waktu yang cukup untuk mendalami ATBI di tahun-tahun berikutnya, karena ini sudah terlambat dan kami juga masuk dalam periode baru masuknya juga udah di ujung akhir tahun, tapi untuk tahun berikutnya saya tidak setuju kalau November karena kami juga tidak hanya mengurus Bank Indonesia, kita juga banyak kegiatan kunker ataupun kegiatan dengan mitra kerja yang lain.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik selanjutnya yang terhormat Pak Hidayatullah. Oh sebentar-sebentar, ya Pak Gub silakan.

GUBERNUR BANK INDONESIA:

Bapak Pimpinan mohon arahan karena saya harus menghadiri Ratas jam 13.00 WIB kalau diperkenankan kawan-kawan deputy.

KETUA RAPAT:

Ya silakan Bapak bisa berikan otorisasi kepada para deputi Pak ya.

GUBERNUR BANK INDONESIA:

Ya, untuk nanti bisa memberikan penjelasan dan tentu saja juga ...(suara tidak jelas) untuk bisa lebih detail terkait dengan tadi Bu Vera mengenai KPI, kemudian juga dari Pak Ramson tadi mengenai beberapa aspek koordinasi kami dengan pemerintah maupun OJK, memang kuncinya satu sinergitas sangat penting, Bank Indonesia untuk itu memang melakukan sinergitas dengan pemerintah untuk bisa fiskalnya bisa memberikan stimulus kemudian dorongan terhadap infrastruktur, investasi, maupun yang lain-lain yang sekarang akan juga dibahas siang ini, juga dengan OJK untuk menurunkan suku bunga kredit.

Mengenai KPI *alhamdulillah* Bu Vera tahun ini inflasinya rendah, lebih rendah dari titik tengah nilai tukarnya relatif stabil, tentu saja nanti kami juga akan sampaikan secara detail KPI-KPI yang ada.

Terakhir saya menyambut baik ajakan Bu Vera, tentu saja biasanya 15 Agustus kami sudah menyampaikan RATBI kepada Komisi, *Insya Allah* tahun depan dengan sinergitas yang lebih erat kita bisa membahas lebih awal mengenai RATBI.

Demikian mohon izin Bapak Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik Pak jadi selamat ratas. Kalau misalnya cepat selesai kami masih jalan kalau Bapak ada waktu mungkin bisa kembali lagi siapa tau ada pingin pendalaman Pak.

Yang kedua tolong sampaikan salam kepada bapak presiden dari seluruh anggota Komisi XI Pak.

GUBERNUR BANK INDONESIA:

Siap Pak.

F-PKB (BERTU MERLAS, S.T.):

Pimpinan interupsi Pimpinan. Saya kira ini mumpung lagi kumpul Pimpinan, kita sepakati dulu untuk pekerjaan kita besok Pimpinan, besok itu kan kita konsinyering RATBI. Nah saya kira kita perlu bentuk panja pengeluaran sama panja penerimaan Pimpinan, mumpung sedang kumpul saja kita sepakati dulu.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Kita sepakati surat kepada poksi sudah kita kirim untuk menyusun panja pengeluaran dan panja pendapatan, nama-nama anggota daripada setiap poksi, sudah saya tandatangani dan kita kirim, tinggal kita masukkan.

F-PKB (BERTU MERLAS, S.T.):

Ya karena biasanya pembentukan panja itu harus dalam bentuk raker Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya ya. Pak Heri.

F-P. GERINDRA (HERI GUNAWAN, S.E.):

Pimpinan, ini Pak Gubernur mau ratas, saya yakin daftar pertanyaan dari 14 orang yang akan bertanya. Nanti malam kita ada FGD dengan BI, besok juga kita akan ada pendalaman-pendalaman dengan BI, apa gak lebih baik sekarang kita putus panja setelah itu kita selesai, begitu Pimpinan. Karena nanti kalau ditanya besok atau nanti malam bertanya lagi hal yang sama lagi nanti malah jadi buang-buang waktu, begitu loh Pimpinan diulang-ulang.

KETUA RAPAT:

Oke baik-baik, Pak Andreas dulu satu lagi.

F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, MM):

Saya sebenarnya sarannya itu, jadi kita langsung kepada pembentukan panja. Kita ketok kemudian kita tentukan *schedule* untuk panja tersebut.

KETUA RAPAT:

Pembentukan panja cukup kita ketok atau perlu dengan kesimpulan? Ketok aja kan? oke, dengan demikian Pak Gubernur, kami akan membentuk panja pendapatan dan panja pengeluaran yang akan dilaksanakan mulai nanti malam, setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Nah selesai, silakan Pak selamat ratas semoga sukses, *monggo* Pak.

Baik kita lanjut saja, kita selanjutnya kepada Pak Hidayatullah, setelah itu Bu Wartiah. Silakan Pak Hidayatullah. *Monggo* Pak.

F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, MM):

Ya saya kira tadi sudah disepakati, jadi untuk pertanyaan kita tindak lanjuti pada saat di panja, jadi sekarang yang perlu ditetapkan adalah panja penerimaan dan panja pengeluarannya.

KETUA RAPAT:

Sudah.

F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, MM):

Sudah? Yaudah kalau begitu sebetulnya kita tutup aja rapatnya. Pertanyaan nanti kita dalami di panja aja daripada dua kali.

KETUA RAPAT:

Ini kan ada mengenai juga mengenai program kerja.

F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, MM):

Program kerja kan akan dibahas diperdalam itu dalam saat pembahasan mengenai rencana kerja dan anggaran tahunan Bank Indonesia.

KETUA RAPAT:

Tapi gini Pak Andreas, tadi itu sebenarnya sudah kita sepakati bahwa karena Pak Gubernur akan ada acara dengan ratas, kita lanjutkan dengan ... dengan pertanyaan yang akan di ini oleh para dewan deputy gubernur. Nah sedangkan untuk panja nanti akan kita bahas mulai besok di konsinyering.

F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, MM):

Anu ya apa gak duplikasi ya, karena biasanya di dalam panja itu pertanyaan yang ada itu akan lebih mendalam lagi, jadi kalau ini pun disampaikan sifatnya ya hanya semacam.

KETUA RAPAT:

Diluar panja penerimaan dan pengeluaran. Pertanyaannya diluar panja penerimaan dan pengeluaran. Ya jadi gitu, sepakat kita tadi kan jadi Pak Hidayatullah dan semua yang akan nanya diluar panja pendapatan dan pengeluaran, setuju Pak ya? Silakan Pak Hidayatullah.

F-PKS (H. HIDAYATULLAH, S.E.):

Terima kasih Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan dan anggota dewan Komisi XI yang terhormat, Pak Deputi Gubernur, Ibu, beserta jajarannya.

Kami telah mendengar di paparan dari Pak Gubernur, tapi kami tidak melihat ya keberpihakannya kepada rakyat. Kami tidak melihat kapan kira-kira *roadmap* nya akan, ekonomi kita akan mandiri berdikari seperti amanah dari Pak Soekarno, berdiri di atas kaki sendiri.

Terkait dengan tugas dari BI, pertumbuhan, inflasi, dan stabilisasi nilai tukar. Saya ingin menyampaikan cerita kami di daerah misalnya terkait nilai rupiah. Sekarang nilai rupiah itu sangat rendah, saya di tahun '70 itu masih bisa berbelanja dengan uang Rp 2500, kami bilangnya seringgit dulu. Kan sekarang itu sudah masuk museum, gak laku lagi dan itu terus berlanjut dan terkonfirmasi dengan rencana undang-undang redenominasi, jadi uang kita ini terlampau besar suaranya tapi nilainya gak ada dan kelihatannya ini akan terus bergerak naik gitu. Tahun '70 rakyat kami di Sumatera Utara surplus disana beras Rp 50 satu kilo tahun '70, sekarang sudah 10.000. jadi stabilnya stabil yang terus meningkat, mungkin bagi kelas elit ini gak terasa, tapi bagi rakyat yang ibarat sudah berdiri di kolam itu permukaan air itu sudah di batas lobang hidungnya. Kalau dilihat dari sisi harga barang misalnya ya, saya tahun '80 itu dengan 10.000 masih bisa bawa kawan satu orang masuk rumah makan padang, makan sepuasnya masih ada kembalian. Sekarang 10.000 gak berani masuk kita Bapak-Bapak, dari luar pun kita harus lihat-lihat rumah makan padangnya. Hatta rumah makan padangnya itu rumah makan padang sederhana, makin gak laku uang 10.000 itu.

Begitu juga dengan nilai tukar, stabil tapi terus meningkat. Kita sekarang di top 10 *the worst currency in the world*, 10 besar uang yang terburuk. Apa yang dilakukan BI ini bagi ekonomi Indonesia bagi pertumbuhan *it's ok*, tapi bagi rakyat yang dibawah gak ada manfaatnya kebijakan-kebijakan seperti ini dan tidak bisa ini ditutupi dengan program-program sosial yang sangat sedikit itu. Jadi kebijakannya itu tidak bisa hanya pertumbuhan saja, harus *include* nanti saya dengar di menteri keuangan juga bicara soal pemerataan itu sangat sedikit

disentuh padahal ketika kita bicara pemerataan itulah bahwa kita sedang membicarakan nasib rakyat kita, tapi kalau bicara soal pertumbuhan kita akan mengabaikan nasib rakyat kita, rakyat kita akan terus seperti itu yang menyebabkan ekonomi kita akan rapuh sangat bergantung kepada kakinya orang, jadi kalau kaki orang bergerak, di Amerika bergerak kakinya kita goncang disini. Tidak punya alasan kita karena India ternyata pertumbuhannya bisa lebih tinggi dari pertumbuhan global, yang kita impor jangan dangdutnya saja, justru bagaimana menjaga pertumbuhan ekonominya yang bisa lebih tinggi pertumbuhan global. Ini dangdutnya saja sehingga rakyat kita joget-joget terus dibawah tapi ekonominya ambruk.

Jadi mohon nanti apresiasi dari Bapak-Bapak, apa yang ada terkait dengan langsung kepada kepentingan rakyat banyak. Tentu ini tidak berdiri sendiri BI nya ada kaitannya dengan *stakeholder* yang lain dengan menteri keuangan tapi kami sudah mendengar ada kesan pesimis lah kita membangun ekonomi ini padahal kita adalah negara besar dengan sumber daya yang luar biasa harusnya kita bisa lebih optimis untuk membangun ekonomi bangsa kita ini.

Demikian Pimpinan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh.

F-PDIP (H. MUSTHOFA):

Interupsi Pimpinan izin sebentar. Sebaiknya pada kali ini pertama adalah untuk mengatur *schedule* panja. Yang kedua bahwa agenda pada kali ini adalah karena anggaran untuk Bank Indonesia sehingga nanti untuk diskusi atau pertanyaan-pertanyaan yang lebih detail bisa nanti pada saat panja. Jadi di FGD juga bisa, sehingga nanti kalau sudah terselesaikan mungkin juga bisa.

Terima kasih Pimpinan.

F-P. GERINDRA (HERI GUNAWAN, S.E.):

Pimpinan interupsi. Maaf Pimpinan Pak Perry sudah meninggalkan ruangan, disini ada empat deputi gubernur, siapa yang menjadi PIC nya ini Pimpinan kita belum tau. Salah satu yang jadi juru bicaranya itu perlu ketegasan dulu Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya siapa Pak yang ditunjuk oleh Pak Gubernur tadi, Pak Erwin? Siapa? Oke Pak Erwin. Tapi nanti kan menjawab sesuai dengan tupoksinya kan ada deputi yang membidangi.

Baik selanjutnya kami persilakan Ibu Wartiah.

F-P. GERINDRA (HERI GUNAWAN, S.E.):

Pimpinan interupsi Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Oke silakan Pak.

F-P. GERINDRA (HERI GUNAWAN, S.E.):

Sebaiknya gini Pimpinan, yang bertanya kalau dia sudah keluar dari ruangan, gak perlu dijawab Pak, untuk menyingkat waktu, tidak menghargai.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Betul, udah kesepakatan pokoknya yang bertanya kalau pas mau dijawab gak ada gak usah dijawab Pak, jawab tertulis aja.

Silakan Bu Wartiah kemudian siap-siap Pak Harry Poernomo. Dan ini pertanyaannya diluar pertanyaan mengenai pendapatan dan pengeluaran. Silakan Bu Wartiah.

F-PPP (Dra. Hj. WARTIAH, M.Pd.):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih Pimpinan atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang pertama tentu saya sangat mengapresiasi atas program yang berhubungan dengan pemberdayaan umat di pondok-pondok pesantren. Kenapa ini sangat kami apresiasi, karena 100% pondok pesantren di seluruh Indonesia adalah swasta, dan tentu daerah pemilihan kami adalah dari Lombok, Lombok itu sebagian besar hampir dikatakan dari pondok-pondok pesantren. Dan dalam hal ini kami mohon kedepan untuk mendapat prioritas ya, untuk ditingkatkan program-program yang berhubungan dengan pemberdayaan umat di pondok-pondok pesantren.

Kemudian yang kedua, saya melihat dari tabel program sosial BI 2019 ada delapan sub tema ya, mulai dari ketahanan pangan strategis, komoditas unggulan, pariwisata, pemberdayaan perempuan, ekonomi digital, ekonomi syariah, Indonesia cerdas, dan beasiswa pengelolaan komunitas beasiswa. Saya mohon yang berhubungan dengan pariwisata juga perlu ada perhatian lebih ya, dan pemberdayaan perempuan disini ada 22 program, kedepannya saya minta juga untuk pemberdayaan perempuan ini mendapat prioritas dari BI. Begitu juga dengan Indonesia cerdas dan beasiswa ya, ini kami sangat memerlukan saya kira semua teman-teman Komisi XI untuk direalisasikan di daerah pemilihan masing-masing.

Kemudian selanjutnya mengenai program strategis BI 2020 saya ingin bertanya bagaimana BI melakukan pengembangan ekonomi berkelanjutan di tengah regulasi yang ada, apakah langkah konkret yang akan ditempuh oleh BI.

Kemudian yang kedua, bagaimana BI melihat sinergi antara regulator terkait ekonomi digital saat ini apakah tantangan terbesar yang dihadapi BI dalam sinergi antar lembaga guna menciptakan ekosistem ekonomi digital yang baik.

Kemudian selanjutnya saya berharap karena ini bicara evaluasi tentu ada namanya indikator kinerja utama. Oleh karena itu perlu BI menyampaikan indikator kinerja utama 2020 dalam dokumen rancangan anggaran tahunan BI 2020 kedepan sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

Yang lain-lain saya kira saya sama dengan penanya terdahulu bahwa kita tidak disini *concern* terhadap penerimaan dan pendapatan ya, pemasukan dan penerimaan, tetapi saya ingin mengingatkan saja bahwa apabila realisasi pengeluaran ATBI 2019 tidak mencapai target maksimal tentu ini menjadi pertanyaan jika nanti 2020 ditambah lagi anggaran untuk itu yang berhubungan dengan MSDM.

Saya kira ini saja Pak Pimpinan, sekali lagi saya mohon program pemberdayaan ekonomi untuk di pondok-pondok pesantren *concern* kami untuk ditingkatkan kedepan.

Terima kasih.

*Wallahul Muwaffiq ila Aqwamit Tharieq,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Selanjutnya yang terhormat Pak Harry Poernomo dan selanjutnya setelah itu siao-siap Pak Heri Gunawan.

F-P. GERINDRA (Ir. H. HARRY POERNOMO):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan dan teman-teman sejawat anggota Komisi XI yang saya hormati, Segenap Deputi Gubernur Bank Indonesia beserta seluruh jajaran yang saya hormati.

Singkat saja dari saya walaupun tadi sudah disinggung sedikit oleh teman-teman terdahulu menyampaikan pendapat maupun pertanyaan ya. Saya hanya akan menyoroti program strategis Bank Indonesia. Dari pengamatan saya sebagai seorang yang lama berkarir di dunia praktisi ya, saya melihat utamanya program strategis Bank Indonesia butir 2 sampai butir 7 ya, ini lebih dominan sinergitas Bank Indonesia dengan pemerintah maupun dengan OJK.

Saya tergelitik menyampaikan pertanyaan ya, kebetulan saya memang tidak mengikuti latar belakang dipisahkannya OJK dari Bank Indonesia. Saya melihat jang-jangan strategi Bank Indonesia yang saya sebut tadi butir 2 khususnya sampai butir 7 ini, ini juga masuk kategori yang disinyalir oleh presiden kita adanya regulasi yang tumpang tindih atau sekarang lagi ngetren orang semua bicara *Omnibus Law*. Artinya perlu penyederhanaan, apakah memang sebaiknya OJK dan BI ini di-merge lagi.

Oleh karena itu kita perlu mencari tolak ukur ya, pengalaman yang sebetulnya memang belum lama ya, lahirnya OJK ini sebenarnya kita perlu amati efektivitas maupun manfaatnya secara strategis seperti apa. Apalagi kalau kita memperhatikan publikasi di media sosial, tanyanya masyarakat lapis bawah kita yang menjadi korban ekonomi digital misalnya. Sementara butir 6 program strategis Bank Indonesia juga ingin meningkatkan ekonomi digital, bekerja sama dengan OJK, dan saya melihat, ini bukti ya kita tidak bisa menyangkal, barang yang paling mewah di republik kita ini kan koordinasi sinergi, birokrasi pemerintahan ini kurang efektif justru penyakitnya karena sinergitas ini kurang.

Oleh karena itu pertanyaan saya secara singkat, saya minta Bank Indonesia dan nanti juga saya akan tanyakan hal yang sama kepada OJK. Cobalah kita kaji ulang keuntungan maupun kerugiannya masing-masing lembaga ini dipisahkan atau terpisah dibandingkan dengan kalau disatukan lagi ini seperti apa, dengan tolak ukur yang tentunya kita sepakati. Kita harus jujur, tadi juga disinggung dipisahkannya OJK ini juga tidak membuat kerja Bank Indonesia menjadi lebih efisien dalam hal pengeluaran pembelanjaan.

Pertanyaan saya pertama itu jadi saya minta nanti Bank Indonesia membuat kajian lah secara jujur kita harus berani introspeksi. Kalau memang nanti kesimpulannya perlu di-merge lagi dua lembaga ini apa salahnya tadi juga dari pendapat teman-teman yang terdahulu sudah mengemukakan kita harus meninjau kembali undang-undang BI, jang-jangan memang kesimpulannya lebih bagus disatukan. Saya curiga mungkin dipisahkannya OJK dengan BI yang lalu, mohon maaf saya tidak begitu paham karena saya tidak mengikuti sejarahnya, jang-jangan hanya trauma kasus BLBI. Kalau itu kan bukan karena rumahnya yang

harus diperbaiki, tapi memang tata kelolanya.

Kemudian yang kedua pertanyaan saya menyangkut upaya Bank Indonesia menurunkan suku bunga, ternyata banyak pengamat, tadi juga disinggung oleh salah satu rekan yang menanyakan, ternyata tidak langsung memberikan dampak positif seperti yang diharapkan, menurunkan suku bunga riil di sektor perbankan umum.

Saya pikir kedepan Bank Indonesia mungkin perlu lebih agresif lagi lebih berani lagi menurunkan suku bunga acuan ini, sementara kita bisa saja belajar dari negara lain bahkan suku bunga di negara-negara tertentu sampai 0% ya.

Oleh karena itu, ya walaupun ini bukan di universitas ya, saya ingin mendapatkan penjelasan secara sederhana saja, bagaimana sih menghitung besar kecilnya penurunan atau kenaikan suku bunga acuan ini bagaimana cara menghitungnya. Mungkin sekali-sekali perlu kita *exercise* di forum Komisi XI ini sebelum Bank Indonesia menurunkan suku bunga atau menaikkan suku bunga acuan di kemudian hari.

Kita perlu bahas bersama, jangan-jangan berapa basis poin yang lalu diturunkan? 50 ya? Berapa? 25, mungkin kurang berani, lebih ambisius lagi lah. Ya kalau perlu lebih turun lagi supaya *impact* nya hasilnya nyata. Kalau negara lain bisa 0% kok kenapa kita gak mungkin kita sampai 2% 3% apa salahnya. Jadi uang itu tidak disimpan di bank, berputar uangnya kan kira-kira begitu logika awam saya mengatakan seperti itu.

Jadi orang dipicu jangan memarkir uang di deposito. Ini juga nanti terkait dengan upaya *tax amnesty* jilid II kita memanggil lagi uang-uang kita yang parkir di luar negeri. Kalau kita memang mau serius memperbaiki ekonomi nasional kita, di dalam pengambilan kebijakan kita harus lebih berani. Saya khawatir Bank Indonesia ini serba ragu di dalam menurunkan suku bunga acuan karena faktor-faktor, ya mohon maaf, ada kepentingan-kepentingan yang nebeng disitu, tidak murni, cobalah lain kali kita *exercise* melalui FGD, kalau perlu FGD dua malam lah, kalau 2 jam: jam 7 sampai jam 9 kurang, 2 hari 2 malam, FGD biasanya malam soalnya makanya saya sebut malam Bu. FGD kan selama ini Bank Indonesia kan malam makanya sebutnya 2 malam.

Kita diskusi sebelum menurunkan suku bunga acuan itu, jangan-jangan 2% kita bisa turunkan itu. Saya belum pernah tau, belum pernah belajar bagaimana formulanya naikkan atau menurunkan suku bunga acuan.

Dari saya dua hal itu Pimpinan, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya yang terhormat Pak Heri Gunawan, tapi sebelumnya kita *break* untuk isihoma jam berapa? Satu seperapat atau setengah dua? Satu seperapat mungkin ya, perut udah mulai halo-halo nih. Pak Heri Gunawan silakan. Setelah Pak Heri Gunawan nanti Ibu Siti. Setengah 2? Jadi kita perpanjang sampai

setengah 2 ya. Oke. Silakan Pak Heri, setelah itu siap-siap Bu Siti.

F-P. GERINDRA (HERI GUNAWAN, S.E.):

Terima kasih Pimpinan.

Pimpinan dan kawan-kawan Komisi XI yang saya hormati, Pak Erwin, Pak Sugeng, Bu Maya, Pak Dody beserta jajaran yang saya hormati.

Tadinya mau nanya banyak ini Pimpinan, tapi ternyata Pak Gubernurnya tidak ada karena ada acara ratas, karena saya sudah menulis untuk bertanya jadi kita bertanya paling hanya sedikit saja.

Pertanyaan saya simpel mungkin saya tujukan kepada para deputi gubernur. Nyaris rata-rata KSSK kita, Komite Stabilitas Sistem Keuangan, baik dari BI baik dari OJK baik dari Menteri Keuangan itu sendiri, bahkan beberapa orang berbicara penurunan ekonomi global mengakibatkan pertumbuhan ekonomi kita terpuruk, nyaris semua berbicara seperti itu. Adanya perang dagang antara China dan Amerika, semua berbicara seperti itu. Saya hanya ingin bertanya nih ke Bank Indonesia, mari kita lihat perang dagang Amerika-China, Vietnam diuntungkan kok, Filipina diuntungkan, kok kita malah saling lempar tanggung jawab begitu loh kesannya. Sampai-sampai kayak kebakaran jenggot, oh kalau begitu regulasi yang 72 undang-undang kita perbaiki dengan *Omnibus Law*, *opo iku* Pak, kajiannya aja belum.

Saya ingin tau, sampai seberapa jauh sih Bank Indonesia ini berbicara. Kawan-kawan Komisi XI tadi berbicara disini, bahkan disini masih banyak sebetulnya bahan kalau kita mau bongkar ada gubernurnya. Kita setuju katanya bank apa namanya suku bunga diturunkan, mari lihat sekarang DPK perbankan kita semakin hari semakin turun, industri keuangan bukan bank pembiayaan semakin hari semakin turun, asuransi semakin hari semakin turun, pasar modal kita semakin hari semakin jeblok semakin banyak *zombie company* disana.

Terus maunya apa gitu loh, kok saya bermitra dengan Bank Indonesia lima tahun yang lalu sekarang juga tahun keenam begini-begini aja tuh. Ceritanya gak ada yang berbeda gitu. Ya mungkin banyak pertanyaan yang ingin disampaikan sebetulnya tapi karena Pak Gubernurnya gak ada lagian kita juga masih ada waktu untuk FGD, kita juga akan membahas rencana anggaran tahunan Bank Indonesia, jadi saya pikir pertanyaannya gak saya buka semua, hanya tadi kebetulan saja sudah daftar begitu loh. Kita pingin tau langkah konkret apa sih yang akan Bank Indonesia lakukan.

Disamping itu mungkin ada catatan kecil yang menggelitik untuk saya. Berbicara bauran kebijakan, berbicara kita berbicara masalah transaksi dan lain sebagainya. Setau saya sistem moneter sistem pembayaran itu adanya di Bank Indonesia. Sampai hari ini nyaris semua warga kita yang megang *gadget* ditawarkan

pinjaman *online*, gak ada tuh langkah-langkah konkret yang dilakukan Bank Indonesia ataupun dengan OJK, padahal disini ada di 12 program itu ada dia tulis, tapi langkah konkretnya seperti apa kita gak tau sampai hari ini masih aja tetap terjadi, gak ada pembicaraan, pinjaman *online* apa susahny sih kan disitu ada situs porno bisa di-*block* sama Kominfo, kita pingin lihat ajalah sekarang BI ada kerja sama gak sih sama Kominfo.

Jadi kesan yang saya tangkap BI berbicara ini bukan kerjaan saya ini kerjaan OJK. Buktinya sampai hari ini nyata tuh bergulir terus, malah nanti mungkin akan kita pertanyakan Pimpinan, seberapa efektif anggaran BI ini dalam mampu merealisasikan visi misi si BI itu sendiri, saya belum melihat itu, ya karena ada waktu untuk pendalaman kita akan dalami nanti.

Saya pikir ini menjadi catatan karena selama ini kita sudah bermitra dengan BI tapi ya bermitra ya begini-begini aja, gak ada langkah konkret yang bisa dirasakan oleh seluruhnya.

Demikian Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih yang terhormat Pak Heri Gunawan. Selanjutnya Bu Siti.

F-PD (Hj. SITI MUFATTAHAH, P.Si.):

Baik terima kasih Pimpinan.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan dan anggota Komisi XI yang saya hormati beserta Bapak dan Ibu mitra kita hari ini dari Bank Indonesia yang hadir dalam rapat kita Raker kita hari ini *alhamdulillah*.

Bapak dan Ibu sekalian, Bank Indonesia saya mohon perhatiannya dari Bank Indonesia. Yang pertama disampaikan oleh kepala Bank Indonesia, Gubernur BI, tadi ada program QRIS yang sedang digalakkan atau sudah dijalankan, saya sangat mendukung itu Pak kalau perlu ditingkatkan untuk melakukan sosialisasi QRIS ini ke dunia pendidikan, ke sekolah-sekolah, universitas sudah dilakukan oke, kalau bisa jangan hanya di universitas negeri tetapi juga di swasta juga lakukan, sekolah-sekolah tinggi dan lain sebagainya itu dilakukan. Dan kalau perlu juga masuk juga ke level anak-anak sekolah Pak sekolah menengah atas, itu perlu karena mereka sudah mulai menggunakan *gadget* dan banyak juga saya lihat beberapa kali bertemu dengan anak-anak sekolah yang sudah menggunakan QRIS ini. Nah ini perlu juga digalakkan, kalau semakin banyak yang melakukan ini maka beruntunglah BI berarti programnya

sudah bisa terserap oleh masyarakat secara baik. Itu yang program QRIS.

Kemudian yang kedua berkaitan dengan program pemberdayaan ekonomi umat yang tadi disampaikan juga akan memberdayakan pondok pesantren saya sangat setuju juga ini digalakkan karena memang tujuan dari pemerintah saat ini salah satunya adalah pengembangan ekonomi syariah, nah ini perlu sangat perlu melibatkan pondok pesantren untuk meningkatkan program ini, untuk menyerap program ini sehingga tujuan dan visi dan misi dari pemerintah untuk menggapai ekonomi syariah ini bisa berjalan dengan lebih baik.

Nah kalau berkaitan dengan ekonomi syariah yang dilakukan oleh BI, BI itu sebenarnya sudah melakukan ikhtiar pengembangan melalui pemberdayaan ekonomi syariah, melakukan edukasi ekonomi dan keuangan syariah juga, serta koordinasi dan kerja sama dengan kelembagaan ekonomi syariah. Nah ini sudah dilakukan dengan baik oleh BI namun setelah dievaluasi saya lihat semester I 2019 itu pertumbuhan usaha syariah baru mencapai 4,8% dan pertumbuhan pasar uang syariah mencapai 4,4%, dan ini menandakan bahwa semuanya adalah dibawah target dari tahunan masing-masing yang tadinya 6,5 dan 15% dari yoy.

Nah ini perlu dilakukan terobosan oleh BI, lakukan evaluasi sebelumnya sehingga untuk meningkatkan efektivitas strategi pengembangan ekonomi syariah ini bisa dijalankan dengan lebih baik. Tolong lakukan strategi yang sangat luar biasa, terobosan yang sangat luar biasa karena ekonomi syariah ini mulai dicintai oleh masyarakat. Oleh karenanya saya mendorong Bank Indonesia dan meminta Bank Indonesia untuk melakukan evaluasi secara mendalam tentang ekonomi syariah ini.

Yang berikutnya saya ingin mengomentari tentang program implementasi sistem bimasakti, saya dengar bimasakti ini menjadi andalan produk andalan Bank Indonesia dan saya ingin Bank Indonesia memberikan jaminan bahwa produk ini, produk bimasakti ini, tidak akan berdampak pada kerahasiaan data, itu yang utama, data itu yang utama Pak karena kalau bobol data kita habislah kita semua.

Mungkin itu saja Pimpinan yang ingin saya sampaikan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik selanjutnya setelah yang terhormat Ibu Siti, yang terhormat Ibu Indah Kurnia, kemudian siap-siap Pak Sihar Sitorus.

F-PDIP (INDAH KURNIA):

Terima kasih Pimpinan.

**Bapak Ibu anggota Komisi XI DPR RI,
Dewan Gubernur Bank Indonesia, Pak Gub sudah meninggalkan kita untuk
ratas.**

Kali ini mungkin saya langsung saja pada pembahasan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Tadi diawal Pak Gubernur sudah menyampaikan bahwa dalam misi Bank Indonesia yaitu berkontribusi secara nyata terhadap perekonomian Indonesia dan mampu sudah melakukan indentifikasi permasalahan yang menyangkut ekonomi mulai global sampai domestik kita, bahwa kita sudah sepakat untuk mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang ada di dalam negeri saja. Dan tadi Pak Gub juga sudah menyampaikan bahwa kondisi ekonomi Indonesia sampai saat ini masih cukup baik, bahkan sampai saat ini sudah di Desember, saat ini 5,2 , 5,02 dan Desember nanti diharapkan 5,05.

Dikaitkan dengan postur anggaran, postur anggaran yang ada di halaman 16 di kami ini, sebenarnya kalau melihat dari postur anggaran yang ada ini rencana ATBI operasional tahun 2020, untuk penerimaan memang masih lebih tinggi dibandingkan dengan pengeluaran, jadi sebenarnya masih surplus, tetapi tetap kami ingin mendapatkan penjelasan tentang rasionalitas misalnya untuk manajemen sumber daya manusia, ini kan tertinggi perubahan meningkatnya yaitu sampai dengan 26%.

Terus kemudian kalo dikaitkan lagi dengan apa yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia akhir-akhir ini yang menurut kami agak sedikit mikro ya jadi hampir semua sektor itu *diopeni* oleh Bank Indonesia, mulai dari mungkin ada infrastruktur, kemudian pariwisata, terus kemudian untuk menanggulangi inflasi misalnya sampai kluster cabai bawang beras dan lain sebagainya, dan terakhir ini saya juga ikut dalam kegiatan terakhir kemarin di Surabaya yaitu sampai dengan PMA jadi penanaman modal akhirat lah jadi sampai bagaimana umat itu dimudahkan untuk berderma, untuk mempersembahkan bagi tuhan kemarin itu Pak Difi, Kepala Kantor yang di Surabaya itu, mengundang museum rekor Indonesia dengan QRIS itu ada 1000 rumah ibadah baik masjid maupun gereja itu menggunakan QRIS sehingga tidak ada lagi hambatan bagi umat untuk bersedekah, untuk mempersembahkan ya termasuk perpuluhan kepada tuhan itu artinya itu semua itu *diopeni* dan tentu saja kami berharap bahwa ini efektif gitu, seluruh program yang baik itu kan harus dilihat diukur keberhasilannya.

Nah dikaitkan pula dengan bauran kebijakan Bank Indonesia yang Pak Gubernur selalu menyebutnya dengan istilah jamu. Memang kunci yang paling penting tadi disampaikan oleh Pak Harry adalah sinergitas, jadi meskipun BI sudah memiliki program yang baik, anggarannya pun juga pasti tersedia karena kemampuan BI di dalam mencari imbal hasil itu cukup baik sehingga untuk penerimaan dari hasil pengelolaan aset valas selalu mencapai peningkatan yang baik. Tadi sempat saya memang sengaja tanyakan agar tidak ada persepsi yang menilai bahwa seolah-olah BI itu kok *happy* ya kalau rupiah melemah misalnya itu,

karena otomatis penerimaan BI jadi meningkat, tetapi kan tidak seperti itu yang dijelaskan oleh Pak Gub tadi. Itu dikaitkan dengan jamu yang telah diramu tadi untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi yang bukan hanya *sustain* tetapi juga merata.

Nah dikaitkan dengan KPI tadi Bu Vera juga menyampaikan tentang KPI (*Key Performance Indicator*), itu bagaimana mengukur efektivitas kontribusi di dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, kemudian menjaga stabilitas nilai tukar, bagaimana mengendalikan inflasi, efektivitasnya yang ingin kami tanyakan Pak Erwin dalam hal ini.

Itu mungkin juga kalau tadi sudah ditanyakan oleh Pak Dolfie tentang peran atau bidang-bidang apa yang *in-charge* bagi Pak Erwin misalnya stabilitas sistem keuangan, kemudian Pak Sugeng sistem untuk peredaran uang dan digital ekonomi dan seterusnya itu apakah KPI dari masing-masing deputi gubernur itu ada atau memang secara kolektif, kolegal, dewan gubernur Bank Indonesia seperti itu yang ingin kami tanyakan.

Jadi yang kami ingin tau adalah efektivitas dari bauran kebijakan Bank Indonesia yang disebut Pak Perry jamu itu bagaimana terhadap tujuan agar visi Bank Indonesia menjadi bank sentral yang berkontribusi secara nyata terhadap perekonomian Indonesia itu bisa kita tau.

Kemudian kita tau bahwa dengan adanya masalah perekonomian global yang gak bisa diprediksi, terus kemudian perang dagang antara Amerika dan China yang selalu disampaikan pada setiap pertemuan di ruangan ini, *ambiguity*, dan seterusnya, kompleksitas permasalahan dunia. Kita memiliki potensi yaitu pariwisata dan UMKM yang saat ini sudah ada hampir 600 UMKM yang dibina oleh Bank Indonesia menjadi salah satu sektor yang mampu menurunkan defisit transaksi berjalan kita. Nah kira-kira apa-apa saja yang kira-kira yang bisa dikorelasikan dengan peran dan fungsi kami sebagai anggota Komisi XI agar kami juga bisa membantu Bank Indonesia untuk memberdayakan para pelaku UMKM kita agar mereka bukan hanya berjaya di negeri sendiri tetapi mereka juga bisa berjaya di ekonomi global.

Itu Pimpinan dari saya, mudah-mudahan nanti kalau jawabannya mungkin tidak bisa hari ini ya bisa tertulis kami tunggu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih. Selanjutnya yang terhormat Pak Sihar Sitorus.

F-PDIP (SIHAR P.H. SITORUS):

Terima kasih Pimpinan.

Selamat siang kembali kepada Bapak dewan deputi gubernur dan

jajarannya.

Mohon maaf ini harus sabar sedikit lagi karena udah lewat jam makan tapi saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Pak. Tadi rekan-rekan kami terdahulu telah juga menyatakan bahwa perlu adanya penguatan secara undang-undang atas untuk peran makroprudensial daripada dari Bank Indonesia dan kemudian juga oleh Ibu Vera tadi disampaikan dengan visi misi presiden dimana presiden menginginkan *income* per kapita sekitar 25.000 *by* 2045, dan juga sudah ditanyakan kira-kira *growth*-nya berapa ini supaya mencapai target tersebut supaya istilahnya Ibu Vera tadi supaya ya sebelum tua bisa kaya, jangan udah tua dulu udah pensiun baru kaya gitu kali ya Bu Vera tadi ya.

Nah terkait itu saya juga ingin menyoroti beberapa hal yang mana saya melihat ada *mix signals* khususnya dari halaman 5 Pak. Kalau kita lihat halaman 5 tabel halaman 5 dari pertumbuhan GDP *growth* yang ada di halaman 5 ini sepertinya *fiscal policy* ini justru lebih responsif dibandingkan dengan *monetary policy* yang dikeluarkan oleh BI. Kita bisa lihat disini konsumsi pemerintah pertumbuhannya positif tetapi dampak daripada *monetary policy* seperti melalui investasi atau ekspor-impor malah menurun, sementara konsumsi masyarakat kayaknya *indifferent* terhadap kedua *policy* yang dikeluarkan oleh pemerintah dan Bank Indonesia.

Kemudian yang *mix signal* lainnya adalah sepertinya fundamental kita masih di dalam ambang kewajaran defisit transaksi berjalan, nilai tukar, cadang devisa, CAR, NPL, LDR, dibawah 100 kurang lebih 90 sekian persen dari pertemuan kami dengan mitra beberapa minggu yang lalu. Jadi ini ada suatu *mix signal* dan pertanyaannya adalah kira-kira langkah apa atau kebijakan apa yang harus BI ambil untuk mensinkronkan respons atas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui *fiscal policy* dan Gubernur BI atau Bank Indonesia melalui *monetary policy* karena kita sekarang selalu udah tiga kali pertemuan dengan mitra atau empat kali pertemuan dengan mitra kami dikatakan kami selalu mendengar bahwa tekanan global sangat kuat sehingga itu membuat kita rasanya gak percaya diri untuk mengejar pertumbuhan yang kita inginkan demi kemajuan kesejahteraan masyarakat kita. Jadi itu pertanyaan pertama dari saya Pak.

Yang kedua pertanyaan saya adalah tadi Bapak Gubernur juga sudah mengatakan perlunya mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru, tadi Bu Indah juga telah menyoroti tentang perlunya sumber pertumbuhan ekonomi baru. Dari daerah pemilihan saya Pak di Sumatera Utara, minimal ada dua wilayah yang bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru, saya mengatakan minimal dua mungkin di Indonesia juga ada tapi dua ini yang terbelakang melalui berdasarkan kriteria yang ada IPM, HDI, dan yang lain-lain ya ini agak terbelakang.

Pertama adalah Nias. Kenapa Nias bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru, karena Nias ini dikelilingi 360 derajat dikelilingi oleh kelautan dan dia bisa membentuk suatu segitiga dagang dengan Aceh dan Sumatera Barat, jadi

potensi ekonominya disana namun *problem* nasional juga ada disana seperti *stunting*. Dan wilayah kedua adalah Madina (Mandailing Natal). Kalau kita lihat sejarah daripada natal, ada dermaga yang dibangun oleh Portugis, berarti beberapa puluh tahun yang lalu. Kalau kita datang kesana hari ini, mungkin hanya orang Portugis yang mengenali bahwa itu dermaga dibangun oleh mereka dan kita tidak kenal wilayah tersebut karena kita tidak pernah bangun daerah tersebut, dan daerah tersebut sangat kaya dengan agro dan pertambangan.

Jadi ini dua wilayah yang bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi, ini menjadi relevan ketika saya membaca paparan ini banyak hal sektor rill yang juga disinggung oleh BI. Jadi saya pikir ini relevan untuk saya sampaikan.

Jadi pertanyaan kedua tadi Pak mohon mampir ke Nias dan juga ke Mandailing Natal.

Yang ketiga, ini terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang dibuat asumsinya oleh BI dimana pertumbuhan ekonomi itu di kisaran 5,05-05,3. Nah sementara beberapa hari yang lalu kita baca di beberapa media massa pertumbuhan perekonomian Indonesia itu akan dibawah 5, akan *slowdown* dibawah 5. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana asumsi ini datangnya sehingga mendapatkan pertumbuhan 5,3 agak berbeda dengan apa yang kita baca di pasar.

Pertanyaan keempat mungkin juga berhubungan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ramson tadi tentang *interest rate* yang turun. Ini sepertinya saya melihat begini Pak, BI *rate* menurunkan 1 *interest rate* melakukan *economy easing* ya apa menurunkan *interest rate* tetapi perbankan *banking industry* sepertinya mempunyai minimal 3 *tier* yang saya lihat. Untuk perusahaan-perusahaan besar mega perusahaan besar sepertinya responsnya mereka mendapatkan *favourable rates* sesuai dengan kebijakan yang diberikan oleh BI ketika mereka mendapat BI menurunkan *interest rate*, *big firms* ini mendapatkan *lending rate* yang *favourable* sehingga *spread* dia juga menarik. Tapi begitu masuk ke *medium sizes firms* atau *small sizes firms* ini menjadi *unfavourable* karena respons dari *banking industry* terhadap perusahaan ini membuat *spread* itu tetap besar sehingga bagi mereka gak menarik untuk masuk ke *lending scenario* dan ini rasanya tidak adil bagi perusahaan-perusahaan menengah dan kebawah ini.

Jadi perlu perhatian bagaimana mereka ini tidak kena *capital rationing* atau respons daripada terhadap kebijakan BI ini juga terasa oleh perusahaan-perusahaan menengah dan kecil.

Ya kira-kira itu Pak yang saya pertanyakan pada siang hari ini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih Pak Sitorus.

Sekarang masih ada tiga lagi, Pak Rudi, Bu Puteri, sama Bu Anis, Pak

Misbakhun gak ada ya. Kita lanjutkan ya masih ada tiga lagi, silakan mungkin Bu, siapa tadi, Pak Rudi Bangun ada? Oh, Pak Rudi gak ada, oke lanjut Ibu Puteri, mba Putri, setelah itu Ibu Anis. Oke

F-PG (PUTERI ANETTA KOMARUDDIN, B.Com.):

Oke izin Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat siang Pimpinan,

Izin senior-senior Komisi XI, Pak Erwin, Bu Maya, Pak Sugeng, dan Pak Dody.

Pertanyaan saya sebenarnya terkait dengan strategi-strategi Bank Indonesia terutama disini ada tentang, di halaman program strategis Bank Indonesia itu untuk pendalaman pasar keuangan konvensional dan syariah untuk menjadi pembiaya untuk infrastruktur. Seperti yang kita tau rencana pemindahan ibukota itu akan mengambil beberapa persen persennya dari APBN, terkait dengan pendalaman pasar keuangan ini yang tadi sudah diangkat juga isunya oleh Bu Siti adalah kurang efektifnya pendalaman pasar keuangan syariah kita.

Jadi pertanyaannya adalah apa program unggulan BI untuk pendalaman pasar keuangan konvensional dan syariah ini mengingat dengan rapor pasar keuangan syariah yang masih merah dan juga biaya yang dibutuhkan itu memang sangat besar gitu. Jadi tadi dari pemaparan Pak Gubernur kita belum mendapatkan pendalaman terkait dengan program prioritas BI terkait dengan pendalaman pasar keuangan ini.

Jadi nanti mohon penjabarannya itu yang pertama, serta yang kedua adalah terkait dengan sistem bimasakti Bank Indonesia yang telah dimulai sejak Desember 2017 dan telah diimplementasikan pada Januari 2019. Apakah Bank Indonesia memiliki mekanisme pengukuran organisasi jika dibandingkan dengan penggunaan teknologi informasi serta tantangan dimasa mendatang, karena setiap tahunnya di RATBI ini anggaran untuk sistem teknologi informasi ini juga bertambah. Jadi yang saya ingin tanyakan apakah penambahan anggaran ini sudah sesuai dengan evaluasi kinerja teknologi informasi yang sekarang diimplementasi terutama sistem bimasakti ini, dan bagaimana BI bisa berevolusi mengikuti perkembangan dunia perbankan yang saya yakin sering juga mengirimkan *feedback* kepada BI dimana mereka berharap bank sentral dan juga OJK sebagai pengawas bisa serevolusioner mereka lah dalam hal pengawasan sistem pembayaran dan juga perbankan ini.

Itu dan juga terkait dengan bimasakti apakah ada teknis-teknis terkait dengan jaminan keamanan dari penerapan bimasakti sendiri karena kita tau bimasakti ini vendornya dari luar negeri juga, jadi mohon pemaparan dari Bapak

Ibu sekalian dewan gubernur BI bagaimana caranya kita menjaga kerahasiaan data terutama karena ini menyangkut dengan data dari seluruh jasa keuangan yang ada di Indonesia, tentu saja data yang sangat sensitif apalagi apabila itu jatuh ke tangan asing.

Sekian pertanyaan dari saya.

Wabillahi Taufiq Wal Hidayah,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam.

Silakan Bu Anis. Setelah itu Bu Linda Megawati.

F-PKS (Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si.):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Tadi belum sempat kenalan, izin Pimpinan saya memperkenalkan diri. Saya Anis Byarwati dari Fraksi PKS.

Saya ingin menyoroti tentang bauran kebijakan Bank Indonesia, ini memperkuat stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan serta turut mendorong momentum pertumbuhan ekonomi. Tadi Pak Gubernur juga sangat tegas bahwa semua bauran kebijakan ini adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Yang ingin saya tekankan adalah tentang ekonomi keuangan syariah yang BI sendiri itu menetapkan sebagai IKU-nya ya, Indikator Kinerja Utama. Tapi sebelum ini saya mau tanya juga, IKU ini yang menetapkan siapa, apakah BI sendiri atau ada dari campur tangan yang lain gitu. Nah indikator kinerja utama tentang ekonomi syariah itu ada di nomor 12 dan 13 dimana disini di laporannya itu target nomor 12 pertumbuhan usaha syariah itu minimal 6,5% *year on year*, tetapi pencapaiannya ...(suara tidak jelas) itu hanya 4,8%. Kemudian nomor 13-nya pertumbuhan pasar uang syariah, ini targetnya minimal 15% *year on year*, sementara pencapaiannya itu 4,40. Jadi walaupun memang bulan lalu kita Indonesia mendapatkan peringkat satu ya, jadi mungkin patut kita mengucapkan selamat juga untuk kita semua bahwa *Global Islamic Finance Report (GIFR)* itu 2019 mendudukkan Indonesia itu peringkat satu setelah 2018 itu peringkat enam naik peringkat satu untuk industri keuangan syariah yang mengalahkan Malaysia yang tahun 2011 itu sudah menduduki nomor satu, tahun ini kita nomor satu.

Tetapi kenyataannya di lapangan sebagaimana juga tadi saya sebutkan dalam laporan BI sendiri bahwa target itu belum tercapai baik dari sisi usaha syariah maupun pertumbuhan pasar uang syariah.

Kemudian data dari OJK juga menyebutkan bahwa yang terjadi di lapangan adalah pertumbuhannya stagnan ekonomi dan keuangan syariah ini gitu, itu diakui oleh OJK dan bahkan dalam respon menerima penghargaan sebagai pusat ekonomi syariah nomor satu, berikutnya mengatakan bahwa ini stagnan perkembangannya. Sementara juga permodalan juga belum terlihat apakah BI memberikan permodalan yang cukup untuk keuangan syariah ini dan bentuk dukungan seperti apa yang diperkenankan oleh BI dalam rangka mencapai target untuk pertumbuhan syariah. Itu satu.

Yang kedua, tadi Pak Gubernur juga menyampaikan bahwa ekonomi dan keuangan syariah kita akan dijadikan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia. Saya juga baca di beberapa media *online* Bapak deputy direktur, deputy gubernur ya menyatakan Pak Dody, bahwa ekonomi syariah itu di Indonesia berpeluang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Nah indikatornya apa, sementara kondisi lapangan ini stagnan begitu. Yang asuransi syariah sendiri itu tahun depan diperkirakan gak bergerak, sementara kita mengatakan ini akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru, indikatornya apa saja dan saya sih senang saja gitu karena saya termasuk yang sangat mendukung perkembangan ekonomi keuangan syariah tapi jangan sampai kita menatapkin target yang kita sendiri melihatnya itu ini apa ya landasannya gitu, *baseline*-nya apa ya sehingga dia bisa menjadi pertumbuhan ekonomi baru.

Nah kemudian yang berikutnya sama seperti pertanyaan mba Puteri tadi tentang bimasakti yang diterapkan sebagai tata kelola BI ini sejauh mana kajiannya dan sudah diterapkan begitu ya tahun 2019 progresnya seperti apa dan karena ini vendornya asing, apakah akan mengganggu kedaulatan kita.

Demikian terima kasih Pimpinan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik selanjutnya Bu Linda Megawati, setelah itu kita *break* ya. Selanjutnya silakan. Oh, masih ada satu lagi Pak, dua? Singkat aja Pak ya biar kita cepat istirahat. Silakan Bu Linda.

F-PD (LINDA MEGAWATI, S.E., M.Si.):

Ya, terima kasih.

Pimpinan dan anggota Komisi XI DPR RI yang saya hormati juga jajaran dari

Bank Indonesia.

Pak saya mau nanya sedikit aja, disini kan tadi ada pemaparan ya dari Bapak Gubernur disini ada pertumbuhan ekonomi itu akan tumbuh 5,1-5,5% tetapi BI akan mengambil di 5,3%, itu kan baru prediksi ya Pak ya. Nah pertanyaan saya, apabila tidak tercapai pertumbuhan ekonomi di 5,3%, kebijakan atau strategi apa saja yang akan dilakukan oleh BI. Itu yang kesatu.

Yang kedua, saya lihat disini ada beberapa pertumbuhan negara ekonominya yang paling besar untuk saat ini adalah PDB-nya yaitu kurang lebih yaitu dari negara India, 6,5%. Nah apakah BI pernah melakukan *study* banding ke beberapa negara yang salah satunya pertumbuhan ekonominya adalah salah satu terbesar di beberapa dunia, atau di beberapa negara ya. Apakah itu ada program atau *study* banding untuk BI untuk melakukan *study* ke luar negeri bagaimana Indonesia juga bisa tumbuh untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi yang ada di negara ini.

Yang kedua Pak, apakah BI juga berkonsultasi dengan pemerintah apabila ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang saat ini belum, tidak sesuai dengan pertumbuhan ekonomi, mungkin BI juga bisa melakukan kebijakan-kebijakan yang dimana bahwa kebijakan itu akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia ini.

Mungkin itu saja pertanyaannya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik silakan Bu Ela. Setelah itu Pak Jon.

F-PKB (ELA SITI NURYAMAH, S.Sos.I.):

Ya terima kasih.

Sebelum ditutup, izin Pimpinan dan para deputi BI yang saya hormati.

Tadi menyimak terkait dengan program sosial BI dalam rangka pemberdayaan sektor riil dan UMKM sudah ada beberapa tahun dilakukan termasuk 2020 kedepan dengan anggaran yang cukup besar, bagaimana misalkan dampak program itu untuk perkembangan di masyarakat, dampaknya seperti apa dengan program yang sudah dialokasikan cukup besar karena kita tau ada kondisi perekonomian nasional yang mengalami fase keterlambatan.

Yang kedua, tadi baru dijabarkan terkait penerimaan dan juga pengeluaran, barangkali perlu pendalaman terkait rencana atau rencana program 2020 mungkin di masing-masing deputi terkait bidang moneter, sistem pembayaran, dan makroprudensial, selain dari keputusan rapat dewan BI yang dilaksanakan 23-24 Oktober. Mungkin perlu pendalaman program yang akan ditempuh 2020 selain hasil dari hasil keputusan rapat yang sudah disepakati.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik selanjutnya Pak Jon.

F-PAN (H. JON ERIZAL, S.E., M.B.A.):

Ya sedikit aja Pimpinan.

Terima kasih Pimpinan dan teman-teman Komisi XI DPR RI.

Bapak-Bapak Deputi Gubernur.

Ada tiga kali saya sampaikan Pak Erwin. Pertama yang saya pertanyakan mungkin Pak Erwin hadir juga di Tokyo dan di New York kemarin tentang *resizing*. Jadi saya butuh *benchmark*, ini tolong gak usah dijawab hari ini, tolong disampaikan pada saat besok kita membahas ATBI. Saya waktu itu minta *comprassion* pembanding *central bank* yang ada di negara lain, nah kemarin contoh karena kita udah di Tokyo dan New York saya minta mereka seperti apa sih *size*-nya, karena ini penting sekali Pak. Saya melihat tiap tahun itu kan naik terus anggaran Bank Indonesia ini sementara *scope of work* nya semakin kecil gitu loh. Nah ditambah *scope of work-scope of work* yang lain-lain saya lihat udah agak melenceng daripada tupoksi. Tupoksi Bapak kan hanya tiga ini di segala macam diurus nanti kan yang pedagang apa dan lain-lain itu, nah diurus nanti pedagang rokok juga kita urus juga di depan Bank Indonesia itu.

Jadi maksud saya fokus pada hal ini, nah kita lihat seperti apa ini Pak karena infrastruktur yang Bapak atau Bank Indonesia punya ini kan udah luar biasa. Nah kami keliling di Indonesia, setiap ketemu Bank Indonesia itu kantornya sepi karena aktivitasnya itu 60% saya lihat berkurang setelah ini pindah ke OJK bagian pengawasan. Nah itu satu.

Harapan saya pada saat rapat besok itu *size* yang *compact* itu yang efisien itu bisa dipaparkan besok Pak, saya *me-remind* itu satu. Nah kedua, ini Pak Sugeng kebetulan ada, saya selalu dan sering mengingatkan kaitan dengan fintek. Kita lihat sekarang di media apa yang saya khawatirkan itu terjadi Pak, beberapa satu *company* 2,4 triliun, kemarin ada lagi kampung kurma atau apa, itu akan muncul setiap hari hal-hal begitu, mungkin itu kaitannya dengan *peer-to-peer* tapi kaitan dengan *e-money* juga nanti itu gak sedikit akan meledak. Itu udah saya punya ekspektasi sebelumnya gitu loh. Nah ini tolong juga dipaparkan langkah-langkah yang telah dilakukan dan yang akan lakukan besok karena itu akan menjadi pertanyaan saya pertama besok itu.

Nah kemudian tadi yang kaitan *scope of work* yang dilebarkan oleh Bank Indonesia ini saya minta kaitan aturannya Pak, kalau tidak mari kita duduk gitu loh,

kita duduk lagi saya sudah mengajukan ke pimpinan Komisi XI ke prolegnas itu undang-undang Bank Indonesia sudah saya ajukan, undang-undang OJK, dan undang-undang perbankan, kami dari Partai Amanat Nasional telah mengajukan tiga undang-undang, ini tolong Pimpinan ini bisa tembus di prolegnas. Jadi karena banyak sekali hal yang harus kita revisi, karena merugikan posisi kita gitu loh.

Jadi tolong teman-teman di baleg yang di Komisi XI ini betul-betul *fight* tiga undang-undang ini harus masuk gitu, karena kalau enggak nanti BI melebarkan *scope of work* tanpa tupoksi, nyalahin aturan, dan itu kan ada dana yang dikeluarkan yang kita setuju nanti, yang kita setuju dan kita ikut juga nanti terlibat. Jadi tiga hal itu tolong besok dipersiapkan betul Pak secara lengkap karena saya *Insy Allah* ikut panjangnya besok.

Terima kasih.

F-PDIP (INDAH KURNIA):

Pimpinan izin sedikit setengah menit tadi ada yang ketinggalan. Pak Erwin sebagai salah satu pilar KSSK, BI kan tentu juga harus terlibat di dalam memberikan literasi keuangan kepada masyarakat kita, itu kaitannya dengan program sosial Bank Indonesia Pak dan pemberdayaan sektor riil dan UMKM. Kalau dari tadi kita bicara tentang mencari sumber pertumbuhan ekonomi yang baru, tapi kita juga harus memikirkan sumber-sumber pembiayaan bagi para pelaku usaha, nah salah satunya mereka akan meminta itu tadi Pak, terjebak oleh tawaran-tawaran pinjaman *online* yang berbahaya tadi itu, bagaimana itu upaya Bank Indonesia untuk terlibat di dalam meningkatkan literasi keuangan agar mereka tidak terjebak dengan bunga tinggi dan cara menagih yang tidak manusiawi.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik demikianlah tadi Pak pertanyaan ada 14 pertanyaan dari anggota Komisi XI DPR RI. Kita *break* berapa lama, setengah jam atau 45 menit sambil makan dan sholat? 45 ya? Jadi setengah 3 tepat kita mulai lagi untuk jawaban dari Bapak Deputi Bank Indonesia. Kita *break* sampai jam setengah 3 ya.

(RAPAT DISKORS)

Kesepakatan kita terlambat 10 menit. Skors saya cabut.

(SKORS DICABUT)

Baik. Tadi sudah disampaikan ada 14 penannya, kemudian kami persilakan dari Bank Indonesia untuk memberikan jawaban, kalau misalnya yang bertanya

tidak ada mungkin dengan tertulis tapi jawaban pun nanti tolong semuanya dengan tertulis juga Pak. Silakan Pak yang mewakili siapa, Pak Erwin silakan Pak.

DEPUTI GUBERNUR BANK INDONESIA (ERWIN RIJANTO):

Terima kasih Bapak Ketua, Pak Dito.

Bapak Ibu anggota dewan yang kami hormati.

Jadi mungkin saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi Pak, namun mungkin nanti akan ditambahkan oleh teman-teman anggota dewan gubernur yang lain.

Jadi pertama-tama mungkin kami dapat sampaikan bahwa memang kondisi perekonomian dunia itu sebagaimana tadi sudah dikemukakan oleh Pak Gubernur memang kondisi *infavourable* karena baik dari sisi pertumbuhan ekonomi dunia, perang dagang, maupun harga-harga komoditas dunia itu mengalami penurunan. Tetapi Indonesia ini kita tidak menyerah begitu saja Pak, banyak sekali langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mengatasi permasalahan tersebut. Antara lain memang seperti tadi dikemukakan, kita sudah menurunkan suku bunga *7 days repo rate* kita itu sudah empat kali Pak, ini salah satu tujuan utamanya memang satu-satunya adalah agar pertumbuhan kita tidak menjadi semakin turun.

Kemudian juga dari sisi makroprudensial kita juga melakukan banyak sekali kegiatan-kegiatan antara lain juga dengan melonggarkan *macroprudential regulation* antara lain CCB (*Countercyclical Buffer*) kita tetapkan 0% sehingga kita mengharapkan agar pertumbuhan kredit itu masih bisa cukup tinggi.

Begitu juga dengan sistem pembayaran kita keluarkan banyak sekali instrumen-instrumen baru. Bahkan kalau kami boleh mengatakan Bapak, pertumbuhan 5,02% ini diluar ekspektasi daripada *market*. Bahkan kalau kita melihat di *Bloomberg* dua minggu yang lalu itu mereka memperkirakan, memprediksikan pertumbuhan kita itu di kisaran 4,9 atau kebawah Pak, tetapi kita masih bisa bertahan di 5,02, bahkan mereka mempertanyakan apakah statistik kita yang salah. Saya rasa ini semuanya adalah berkat usaha dari baik Bank Indonesia maupun pemerintah untuk supaya kita bisa tetap mempertahankan pertumbuhan yang baik.

Demikian juga dengan nilai tukar Pak, nilai tukar itu kalau untuk tahun ini di negara-negara yang lain *emerging market* itu *relatively* mengalami depresiasi atau mengalami penurunan, kita justru meningkat 2,49% *year on year* nya. Jadi kita itu malah yang lebih baik gitu, dan apa langkah-langkah yang kita lakukan juga, kita juga cadangan devisa kita pertahankan tinggi Pak. Jadi kalau *benchmark* internasional itu hanya tiga bulan kita itu sudah bisa mendapatkan diatas enam bulan, bahkan untuk bulan yang lalu itu kita sudah bisa mencapai diatas tujuh bulan. Bahkan seperti tadi dikemukakan oleh Pak Gubernur, kita itu cadangan

devisa kita 126, kisaran 126 miliar US\$, ini termasuk hasil yang tinggi Pak yang tertinggi yang dicapai secara *historic* kita.

Kemudian tadi ada pertanyaan yang terkait dengan bagaimana dengan penetapan BI *rate* kita. Memang untuk BI *rate* ini kita tidak begitu saja dengan mudah melakukan itu karena ada beberapa pertimbangan, kami tiap bulan itu melakukan pembahasan untuk dua hari sendiri Pak untuk menetapkan suku bunga Bank Indonesia. Salah satu pertimbangan kita adalah inflasi Pak, tentu saja inflasi itu berapa besarnya inflasi, nah inilah ini menjadi salah satu ukuran kita apakah kita bisa masih mempunyai keleluasaan untuk menurunkan atau tidak.

Begitu juga dengan kita harus mempertimbangkan juga sebagaimana tadi dikemukakan oleh Ibu Vera, itu memang dana dari asing itu yang di SBN ini kan memang kisarannya sekitar 37% itu dimiliki oleh asing. Begitu juga di pasar modal itu 50% dari dana itu ada di asing. Sehingga disini kita harus selalu mempertahankan *comparative* perbandingan dengan negara-negara *emerging* lainnya, *yield* daripada hasil yang bisa diberikan oleh Indonesia. Kita tidak bisa menurunkan begitu rupa sehingga kita mungkin kalah dibandingkan dengan negara-negara *peer* kita, antara lain *peer* kita adalah India, *Philippine*, Malaysia, itu juga sebagai salah satu negara yang selalu kita pantau sehingga supaya kita jangan sampai kita *capital outflow* untuk ke negara-negara tersebut. Itu salah satu diantaranya yang harus kita pertimbangkan sehingga kita selalu membahas itu melihat dari banyak sektor dan banyak pertimbangan yang kita lakukan.

Kemudian kalau terkait dengan IKU (Indeks Kinerja Utama) kita itu setiap saat kita laporkan, bahkan kalau di laporan ini di halaman 10 itu kita dengan secara tegas kita jelaskan bahwa Bank Indonesia itu memiliki 19 indeks kinerja utama. Tadi salah satu diantaranya mungkin kalau yang ditanyakan adalah terkait dengan ekonomi syariah itu kita menargetkan 6,5% pertumbuhannya, pertumbuhan usaha syariah, dan tadi dikatakan kita baru mencapai 4,8%, begitu juga pertumbuhan pasar uang syariah 15% itu baru tercapai 4,4%, itu memang betul demikian tetapi itu adalah di triwulan kedua Pak, jadi kalau kita melihat triwulan ketiga saat ini itu semuanya sudah kita sudah mencapai bahkan pertumbuhan ekonomi syariah itu saat ini sudah mencapai 6,7%, jadi sudah diatas daripada target pertumbuhan yang kita canangkan di awal.

Sedangkan untuk pertumbuhan pasar uang syariah itu yang kita canangkan 15% di triwulan kedua itu baru 4,4%, saat ini sudah mencapai 14,88% dan kita memperkirakan akhir tahun nanti itu juga semuanya sudah bisa kita ...(suara tidak jelas) jadi memang kita monitor secara triwulanan kalau seandainya Bapak Ibu mungkin membaca laporan yang terdahulu mungkin jumlahnya memang masih dibawah itu.

Jadi apasih yang kita jadikan sebagai *clue* itu mulai dari inflasi, ke inflasi inti, kemudian ...(suara tidak jelas) nilai tukar, bahkan dalam kaitannya dengan sistem pembayaran kita juga mengukur pencapaian kita di dalam ketersediaan layanan *financial market infrastructure* kita. Ini apa yang kita maksud dengan ini, ini adalah kita karena Bank Indonesia itu juga sebagai penyelenggara sistem

pembayaran dalam kaitan dengan kliring dan RTGS, kita harus membuat suatu ketentuan yang sangat ketat sekali yaitu ketersediaan jasa itu harus 99,97%. Jadi kita tidak mentolerir sampai sistem kita itu *down* terlalu lama. Bahkan insidennya itu kita maksimum satu kali dan itu *alhamdulillah* kita bisa capai gitu. Ini terkait sekali dengan apa yang dikemukakan dipertanyakan tadi yang terkait dengan bimasakti juga, mengapa bimasakti itu setiap tahun anggarannya selalu ada, karena memang proyek ini adalah proyek *multiyears* sehingga memang beberapa tahun penyelesaiannya tidak hanya selesai dalam waktu satu tahun, tetapi ini dilaksanakan secara bertahap sehingga setiap tahun memang masih ada mengeluarkan biaya-biaya secara terus-menerus.

Yang menjadi prioritas kita adalah seperti yang dikemukakan tadi memang dari sisi *security* Bank Indonesia sangat ketat sekali Pak untuk menerapkan *standart*-nya Pak karena kita tidak menginginkan adanya gangguan yang disebabkan oleh baik dari dalam sendiri ataupun dari pihak luar yang mencoba untuk masuk dalam sistem kita. Mungkin nanti bisa ditambahkan dengan teman-teman kami yang lain.

Demikian Pak, jadi mungkin saya secara singkat saja ingin menyampaikannya karena nanti toh kita akan melakukan FGD dan besok kita masih secara dua hari penuh kita akan menyampaikan paparannya yang lebih lengkap lagi Pak dan mungkin kalau Bapak menginginkan pendalaman lebih lanjut mungkin kita bisa lakukan pada saat itu karena kita juga lebih bebas Pak.

Mungkin demikian Pak, jadi mungkin kami ingin menawarkan kepada rekan-rekan dari dewan untuk bisa menambahkan.

Makasih Pak.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Silakan kalau mau nambahin.

DEPUTI GUBERNUR BANK INDONESIA (DODY BUDI WALUYO):

Terima kasih Pimpinan.

Bisa beberapa poin dapat kami sampaikan, mohon maaf saya bicarannya agak sedikit pelan ada sedikit gangguan. Pertama terkait ... ekonomi, menyampaikan tadi melengkapi yang disampaikan oleh Pak Erwin, pertama adalah kalau kita melihat perekonomian Indonesia pertanyaannya adalah apakah kita tidak bisa tumbuh diatas 5%. Begini Pak, kami melakukan studi dan *outlook* kita mengatakan kita akan mencapai di kisaran 6%, 6,1 , 6,2 , sekitar 5-6 tahun dari sekarang, dengan catatan bahwa skenario itu adalah skenario kebijakan, artinya kebijakan penuh dilakukan oleh semua kepentingan baik itu yang ada di sektor permintaan maupun di sektor riil, itulah kemudian yang akan mendorong ekonomi kita bisa menuju sampai ke kisaran 6,2%.

Nah siapakah dia, memang disitu memang kombinasi Pak bauran

kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan di pemerintah melalui fiskal dan yang lebih penting adalah reformasi struktural itu berjalan Pak. Nah kita melihat kalau kita sudah bicara di jangka menengah jangka panjang, faktor-faktor produksi seperti misalnya SDM, *human resource*, kita bicara *capital*, kita bicara teknologi, kita bicara infrastruktur, itu lebih bermain lebih signifikan ketimbang kita hanya mengandalkan dari sisi suku bunga, dari sisi kebijakan fiskal yang sifatnya memang secara desain kebijakan itu yang lebih ke jangka yang lebih pendek.

Nah oleh karena itu memang kita melihat sekarang ini, masuk poin dua kami adalah Bank Indonesia memang sesuai dengan mandatnya berusaha menjaga stabilitas baik itu inflasi maupun nilai tukar, itu sesuai dengan mandat kita, dan kita juga mencoba sekarang meskipun belum masuk di amandemen, adalah menjaga bersama-sama dengan kementerian/lembaga lain menjaga stabilitas sistem keuangan.

Nah dalam hal tiga hal itu sudah tercapai dan sekarang kita lihat relatif sudah stabil, rupiahnya stabil, harganya rendah, Bank Indonesia melihat sekarang saatnya mendorong pertumbuhan, saatnya kita menurunkan suku bunga, saatnya kita memberikan stimulus selain pemerintah melalui fiskal kepada sektor perekonomian. Dan oleh karena itu memang yang menjadi penting adalah stimulus kita ini akomodatif kita baik dari suku bunga, baik dari kebijakan makroprudensial, bahkan kalau tadi dengan Ibu Siti kita membahas mengenai ekonomi keuangan, Bu Anis mohon maaf, menggunakan ekonomi keuangan syariah sebagai motor untuk mendorong pertumbuhan karena kita melihat sekarang momentum pertumbuhan harus didorong dengan melihat resikonya sudah relatif kita bisa kendalikan stabilitasnya bisa kita jaga.

Jadi memang menjadi penting adalah kita tidak bisa langsung memotong suku bunga secara ... Pak ya karena memang harus kita ukur inflasinya kena dampak atau tidak, nilai tukarnya kena dampak atau tidak.

Jadi itu pola berpikir kita, yang penting sekarang adalah Bank Indonesia dalam hari-hari ini melihat momentum pertumbuhan terus didorong. Nah bahkan kita sendiri melihat ruang untuk misalnya kebijakan akomodatif itu masih tetap terbuka sepanjang memang kita melihat data-datanya mendukung ke arah tersebut, itu yang kita sebut sebagai *data dependent*.

Jadi itu mungkin dua poin kami, seterusnya kalau kita melihat sekarang tadi ada pertanyaan juga yang bagi kami juga cukup penting, kenapa BI kemudian keluar dari pagernya gitu, kita masuk seolah-olah kepada sektor-sektor yang mungkin bisa dikatakan itu sektor-sektor yang ada di wilayahnya pemerintah. Kata kuncinya mungkin sebenarnya kata kuncinya adalah sinergi dan koordinasi Pak karena kita melihat bahwa sebenarnya dengan kita meletakkan diri kita Bank Indonesia sebagai fasilitator, akselelator, toh kita juga tidak bisa menggunakan kebijakan *financing* kepada sektor tersebut, kita bisa masuk untuk mendorong melalui kapasitas kita misalnya kajian kita, kita bertemu dengan beberapa sektor yang bisa kita unggulan untuk kita usulkan kepada pemerintah sebagai sektor unggulan, dan kombinasi itu koordinasi itu yang telah berjalan selama ini dan kita

melihat bahwa melalui kita punya rakor koordinasi pemerintah pusat pemerintah daerah Bank Indonesia sebagai salah satu yang ibaratnya ya kita memfasilitasi atau kita mengaselerasi untuk melihat semua permasalahan yang ada di pusat dan daerah, apa masalahnya, relatif kita bicara masalah di sektor riil, sektor manufaktur, sektor-sektor infrastruktur, sektor-sektor pariwisata. Itu yang kita dorong, kita melihat sekarang ini paling tidak...(suara tidak jelas)...paling tidak *vehicle* paling tidak pariwisata, paling tidak juga yang terkait sama kalau di syariah itu ada juga kita bicara wisata halal itu yang perlu didorong dari kaca mata Bank Indonesia secara prioritas.

Itu dua poin dari kami, yang terakhir terkait dengan *concern* dari tadi Ibu Vera tidak ada, mengenai kepemilikan asing terhadap surat berharga di Indonesia, benar sekali Pak bahwa asing ini sekarang ini mencari *return* yang paling besar dari penempatan dananya karena semua di negara dunia cenderung suku bunganya rendah dan Indonesia salah satu negara yang menawarkan *return* yang terbaik.

Oleh karena itu dana masuk ke Indonesia bisa membiayai kepada kekuatan rupiah kita, juga bisa membiayai beberapa kebutuhan ekonomi. Poin sekarang adalah pertanyaannya adalah bagaimana menjaga stabilitasnya. Yang penting disini Bapak, kita akan melihat bahwa proporsi asing yang sudah naik baik itu di *equity* dan juga yang ada di surat berharga negara, bagaimana diturunkan bukan dengan mengurangkan porsi mereka, tapi bagaimana menaikkan porsi domestiknya.

Oleh karena itu bagaimana pemerintah, Bank Indonesia mengajak misalnya penerbitan surat berharga negara retail misalnya, mengajak dana pensiun, mengajak asuransi, untuk meningkatkan proporsi daripada domestiknya. Kita tentunya tidak akan mencoba untuk melakukan *capital control* apapun terhadap aliran dana masuk karena memang itu penting bagi kita, yang penting kita jaga stabilitasnya, toh kita akan terus ada di pasar menjaga rupiah stabil, kita akan terus masuk ke pasar seandainya diperlukan dan yang penting kita tidak mengatur suku bunga, mengatur nilai tukar itu sesuai dengan keinginan kita tetapi itu adalah mekanisme pasar yang menetapkan.

Demikian Bapak, mudah-mudahan saya yakin tidak menjawab semuanya, tapi mungkin nanti bisa kita perdalam pada saat pembahasan di FGD maupun di panja.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih. Pak Sugeng mungkin silakan.

DEPUTI GUBERNUR BANK INDONESIA (SUGENG):

Bismillahirrahmanirrahim.

Terima kasih Pak Ketua.

Ada beberapa *concern* tadi dari anggota dewan yang saya catat antara lain dari Bu Anis ya, Bu Anis, juga Bu Siti tadi mengenai bimasakti ya. Memang betul kami di dalam mengembangkan bimasakti itu bekerja sama dengan vendor asing, kami pilih memang vendor yang sudah cukup mumpuni, dan penerapan sistem ini akan ada beberapa sistem yang menggunakan...(suara tidak jelas)...ini. Ini memang sudah digunakan oleh beberapa negara, jadi kita termasuk tertinggal, di Malaysia sudah kemudian Thailand sudah, *Singapore* sudah, jadi kita memang di belakang.

Pertama masalah keamanan, keamanan Ibu kami di dalam, memang sangat penting masalah datanya, data adalah sangat penting sekali oleh karena itu kami yang pertama langkah kami adalah di sisi legal ada klausula mengenai kerahasiaan data, jadi ini yang kami pegang disitu jadi data harus tetap terjaga dengan baik, tidak bisa bocor keluar.

Yang kedua kami kawal juga di organisasi kami Bu, kami ada unit khusus yaitu unit khusus transformasi sistem informasi, ini yang mengawal bagaimana proses ini ... sistem ini dengan bagus, bahkan di dalam migrasi data kita kawal, jadi vendor eksternal tadi kita kawal benar jadi kita tau persis apa yang dilakukan mereka dan ini kita menjamin bahwa proses akan berjalan dengan baik.

Kemudian yang keamanan yang juga kita akan jamin bahwa internal jaringan BI dan proses *data center*, *disaster center*, itu terjadi di kita, jadi semua data diolah dengan jaringan kita internal kita, bahkan juga dengan ...(suara tidak jelas) luar negeri juga merupakan jaringan privat kita, jadi kita dari sisi jaringan juga kita pastikan aman.

Kemudian yang proses yang keempat yang sangat penting adalah kita ada tahapan-tahapan sebelum ...(suara tidak jelas) daripada sistem diterapkan. Yang sangat penting kita ada salah satu tes adalah *penetration test* jadi kita uji sistem kita apakah bisa ditembus atau tidak, setelah gak bisa ya itu berarti kita aman. Jadi ada beberapa langkah yang kita lakukan.

Demikian itu yang terkait dengan masalah bimasakti, sebagian sudah berjalan dengan baik Pak Ketua dan Bapak Ibu sekalian, dan terus kita kawal karena ini ada *learning* ...(suara tidak jelas) nya juga, jadi yang kekurangan-kekurangan kita tutupi, kita perkuat, termasuk tentunya koordinasi dengan seluruh kantor perwakilan kami di seluruh Indonesia.

Kemudian tadi juga ada masalah pentingnya sinergi ekonomi dalam mengembangkan ekonomi keuangan digital, tadi antara lain ditanyakan oleh beberapa anggota dewan termasuk Bu Wartiah kami catat disini, bahwa memang sinergi ini sangat penting sekali, kami mencermati bahwa di dalam perkembangan teknologi, berkembangnya fintek, ini memang kita perlu dorong karena memang ada invasi yang bisa menimbulkan suatu energi baru di dalam sumber tadi antara lain mendorong digitalisasi dan merupakan sumber mendorong pertumbuhan ekonomi.

Fintek berkembang kemudian bank juga dalam kondisi yang kita memasuki era digital, toh juga kita harapkan harus ...(suara tidak jelas) harus berubah juga. Ini sangat penting adanya semacam *collaboration* antara bank dan fintek, bank bisa memanfaatkan misalnya data-data misalnya *credit scoring* yang dibuat oleh fintek-fintek ya, namun tentunya nanti kita buat kalau di dalam kolaborasi tadi, integrasi tadi, adanya standar-standar minimal yang harus dipenuhi baru-baru ini khususnya dari finteknya sehingga kita akan termonitor siapa yang meminjam dari fintek terdata baik di Bank Indonesia, jadi keuntungan tadi adanya integrasi antara bank dan fintek.

Demikian juga kami perlukan tadi juga integrasi tadi juga integrasi tadi kita mengurangi, mendapat pelajaran dari China, terjadinya *shadow banking* di China, ini jadi dengan adanya integrasi tadi semua termonitor dengan bagus oleh Bank Indonesia, jadi kalau di China mungkin gak tau kalau mungkin *shadow banking* ini sudah besar sehingga bisa membahayakan. Nah ini kita baru di dalam pengembangan juga memperhatikan itu.

Kemudian ada juga *concern* mengenai tadi mengenai fintek *lending*, ini yang kami dari sisi moneter ini sangat *concern* karena ini terkait tadi yang pertama juga kalau ada *shadow banking* yang besar itu juga bisa membahayakan kalau fintek sudah besar bisa jatuh dan bisa membahayakan kestabilan sistem keuangan kita.

Oleh karena itu kami di RDG, kami memonitor semua pada dasarnya memonitor semua perkembangan fintek khususnya di kami yang menjadi area kami adalah fintek *lending*, tetapi juga kami memonitor fintek di *lending* karena ini juga sangat terkait erat dengan fintek di *payment system*. Jadi kami terus monitor, kami mencatat ketentuan-ketentuan pada POJK juga telah diterbitkan telah ditetapkan beberapa tahapan terkait dengan perizinan yang kalau fintek akan beroperasi. Kemudian juga kami catat disitu di POJK-nya juga ada pelaporan daripada masing-masing kegiatan oleh fintek.

Yang kami lihat juga langkah sangat bagus langkah dilakukan oleh OJK, pembentukan satgas khusus untuk menertibkan terutama fintek-fintek yang ilegal. Jadi kami catat ada beberapa, kalau dari *note* kami itu satgas telah di dalam bulan Oktober ini sudah menutup sekitar 110 fintek ilegal, tentu ini kerja sama dengan Kementerian Informasi untuk bisa menutup *website*-nya maupun akses internet finteknya sendiri. Ini yang terus kita cermati.

Oleh karena itu kedepan kami juga sangat penting seperti saya kemukakan di dalam visi sistem pembayaran 2025, kami mendorong adanya semacam *collaboration* antara bank dengan fintek tadi sehingga semuanya tadi bisa termonitor dengan bagus kegiatan-kegiatan fintek.

Demikian mungkin Bapak Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih Pak Sugeng.

Ibu Rosmaya mau menyampaikan silakan Bu.

DEPUTI GUBERNUR BANK INDONESIA (ROSMAYA HADI):

Terima kasih Pak Ketua.

Yang saya hormati Bapak Ketua dan Bapak Ibu anggota Komisi XI DPR RI yang saya cintai saya banggakan.

Ada tiga hal yang saya ingin coba untuk menambahkan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah tentang bagaimana tadi ditanyakan tentang kantor perwakilan Bank Indonesia yang ada di 46 kantor di Indonesia ini untuk berperan untuk Indonesia dan juga bagaimana konektivitasnya dengan masyarakat Bapak Ibu sekalian. Jadi perlu kami sampaikan bahwa 12 program strategis yang tadi disampaikan itu adalah semuanya akan tercermin untuk dilakukan juga oleh kantor perwakilan dalam negeri Bapak Ibu sekalian. Mulai dari TPID bagaimana pengendalian inflasi itu berupaya agar supaya daya beli masyarakat itu bisa terjaga sehingga ini perannya kita berkoordinasi dengan pemerintah dan semua *stakeholder* di daerah sehingga masyarakat akan dapat membeli barang dengan harga yang tidak bergejolak.

Kemudian juga Bapak Ibu sekalian, kembali bahwa juga di daerah kami cerminan untuk mengembangkan UMKM karena UMKM sudah dipetakan oleh Bank Indonesia cara memperlakukan mereka terbagi sekarang menjadi empat bagian besar yaitu UMKM yang masih awal atau potensial, itu kami perlakukan atau di-*push* untuk produksinya untuk mengenal untuk bisa melakukan pembukuan dan seterusnya. Kemudian naik kelas lagi adalah UMKM yang sukses, yaitu mereka yang menggunakan marketing yang lebih modern lagi. Kemudian juga naik kelas lagi ada yang ketiga UMKM sukses digital, itu lebih ke sudah mulai dari pembiayaan kemudian *e-commerce* nya sudah jalan. Dan yang keempat yang memang kami ingin dorong adalah UMKM yang sukses ekspor, nah itu yang merupakan juga keinginan kita untuk berperan karena kembali bahwa kita sesuai dengan PS yang nomor 2 itu bahwa kita harus mengatasi *current account defisit*, dan *current account defisit* salah satunya adalah upayakan dengan *trading* melalui UMKM atau perusahaan-perusahaan besar *trading*, dan yang kedua tentu saja pariwisata.

Nah ini kembali tadi saya sangat tertarik juga Bapak Sihar untuk tolong dilihat pulau Nias, kemudian pulau Mandailing Natal ya Bapak, Mandailing ya, itu kami ada di dalam wilayah Sumatera KPwDN kami sehingga kami akan *push* Pak karena kita harus dorong apa saja potensial yang bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Nah ini semua kita lakukan.

Kemudian juga termasuk syariahnya juga, mungkin Ibu Anis, kami tadi sependapat Bu Anis juga kita harus dorong supaya pesantren kemudian memiliki kemandirian agar supaya santri-santrinya iya mengaji iya juga memiliki kemandirian untuk perekonomian di wilayah pesantren itu. Banyak beberapa *piloting* dari mulai pengolahan sampah kemudian ada yang pro untuk melakukan peternakan sapi dan seterusnya ada perkebunan seperti Katata dan Al-Ittifaq, itu menjadi *pioneer-pioneer* yang bisa kita dorong kemudian *piloting* kita *copy* ke daerah-daerah yang lain.

F-PKS (Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si.):

Interupsi Pimpinan, mau tanya sedikit, Pak Dito saya. Bu Rosmaya, program pesantren itu dimulai sejak kapan dan sudah berapa pesantren yang *discover*.

DEPUTI GUBERNUR BANK INDONESIA (ROSMAYA HADI):

Nah ini kembali bahwa setiap kantor perwakilan Bank Indonesia itu memiliki wilayah masing-masing pesantren. Jadi ini sudah mulai dilakukan sekitar empat tahun yang lalu ya, dari 2012, oh 2015, 2015. Nah ini salah satunya *event-event* nya adalah yang tadi disampaikan ada ISEF yang kemudian kita bisa melahirkan bagaimana wakaf produktif dan seterusnya, begitu dari 2015.

Nah ini kembali setiap pesantren punya keunikan Bapak Ibu sekalian sehingga ini bisa di-*copy paste* ke wilayah pesantren yang lain, ada yang senang peternakan ya ke peternakan, kemudian ada yang pertanian maupun yang digital itu juga ada yang untuk *e-commerce*. Nah itu kira-kira.

Nah kemudian yang kedua dengan Pak Sihar, Bapak kami ingin mendalami sekali tentang Nias dan Mandailing itu ya Bapak untuk proyek-proyek kami di 2020.

Kemudian yang ketiga, kami ingin tadi sudah sependapat Pak Erwin, Pak Sugeng sudah menyampaikan tentang adanya bimasakti itu yang ditanyakan juga dengan Ibu Puteri Komaruddin beserta juga Bu Anis tadi, gimana nih keamanannya. Baik Ibu sekalian bahwa bimasakti itu dikembangkan betul-betul secara bertahap kita betul-betul menjaganya dari sisi keamanan, seperti *system implementation*-nya kita jadikan ada tujuh *whip* atau tujuh *stages* sehingga kita satu per satu kita lakukan dengan sangat baik melihat apa yang dengan metodologi yang *proven* pastinya. Kemudian ada juga proses *adoption*-nya tentu kita harus jaga supaya itu baik, *change management*-nya juga kita lakukan, termasuk adalah *help desk* jika ada sesuatu yang masih *miss*, kemudian juga kembali proses *management*-nya itu tentu dengan konsep yang betul-betul kita tangani dengan baik.

Nah itu kita lakukan keamanannya baik dari proses waktu pengembangan seperti tadi, juga pada saat melaksanakan Bu Puteri, Bu Anis, jadi pada saat

melaksanakan, kita menggunakan metode tentu saja ada pengamanan, jadi ada *user id* nya dan siapakah *maker* kemudian *checker* dan *approval* kita juga lakukan itu dan juga tentu ada pengamanan-pengamanan yang dilakukan di bimasakti itu sendiri baik dari sisi jaringan, kemudian infrastruktur itu, sehingga bisa kita katakan bahwa bimasakti itu solusinya *on premise* jadi bukan *on cloud*, jadi dengan demikian itu *Insy Allah* aman begitu Bapak Ibu sekalian.

Demikian Pak Ketua.

Terima kasih.

DEPUTI GUBERNUR BANK INDONESIA (ERWIN RIJANTO):

Mungkin kalau dengan izin Bapak Ketua, karena pertanyaanya banyak juga yang terkait dengan syariah, Pak Dody ini adalah di bidang yang membidangi syariah mungkin ada yang ditambahkan Pak Dody.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Dody silakan.

DEPUTI GUBERNUR BANK INDONESIA (DODY BUDI WALUYO):

Terima kasih Pimpinan.

Tadi beberapa sudah disampaikan oleh Ibu Maya, Ibu Rosmaya Hadi, kami melengkapi sedikit saja terkait dengan syariah. Memang syariah yang kami kembangkan, Bank Indonesia inisiatif kembangkan adalah melihat ekonomi dan keuangan syariah, jadi konteks keuangan syariah selama ini meninggalkan ekonomi syariah dari sisi pengembangannya relatif tidak akan *balance* tidak akan seimbang dan demikian juga sebaliknya.

Oleh karena itu tiga pilar yang diangkat oleh Bank Indonesia dalam hal ekonomi keuangan syariah adalah bagaimana mengembangkan ekonomi syariah dalam konteks rantai nilai perdagangan halal yang kita sebut sebagai *halal value chain*. Disitu adalah memang kita melihat pasar untuk ekonomi muslim kita yang sangat besar, permintaannya sangat besar yang saat ini memang lebih banyak diisi oleh pemain global.

Nah oleh karena itu memang kita mencoba bagaimana produsen domestik bisa mengisi konteks pasar yang halal itu dan oleh karena itu beberapa inisiatif yang kita bawa tidak semuanya Pak Ketua memang kita lebih melihat misalnya terkait dengan *fashion* muslim, kemudian *halal food*, kemudian *tourism* halal, kemudian kosmetik halal, itu ada empat-lima yang kita inisiatif yang kita dorong kita jadikan semacam inisiatif bersama dengan beberapa kementerian/lembaga khususnya dengan KNKS (Komite Nasional Keuangan Syariah) untuk bagaimana *halal value chain* itu terbentuk, siapa pihak produsennya, memang disini bisa koperasi besar, bisa UMKM syariah sebagaimana disampaikan oleh Bu Rosmaya

Hadi, bisa pondok pesantren, yang penting ada *link* kepada pasarnya, siapa pasarnya? Saat ini memang baru ke pasar domestik yang suatu saat bisa saja *value chain*-nya kepada pasar global.

Nah oleh karena itu nanti bisa menutup isu masalah yang disampaikan oleh Bu Vera tadi bagaimana masalah *current account defisit* melalui format syariah, disitulah juga nanti itu menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru. Kita tidak melihat nilainya dulu secara berapa besar loncatan telah terjadi, tetapi kalau kita melihat sekarang ini sudah ada kita kerja sama dengan 250 pondok pesantren dari total nasional kita 32.000 pondok pesantren, jadi kita sudah melihat beberapa pondok pesantren sudah mulai keluar tidak saja mereka mandiri secara pesantrennya, tetapi sudah bisa menghasilkan sesuatu untuk dijual ke masyarakat.

Jadi itulah terbentuknya *value chain* tadi Pak dan mudah-mudahan ini bisa terus terjadi, dan ini juga menjawab pertanyaan tadi saya sepakat dengan Pak Hidayatullah bagaimana membentuk ekonomi yang tidak saja ekonomi yang berkualitas tidak saja tumbuh tapi juga pemerataan, dari situlah kita melihat salah satu upaya kita adalah bagaimana pemberdayaan melalui syariah Pak, bagaimana pemberdayaan melalui UMKM. Jadi konteks kita melihatnya adalah ekonominya tumbuh berkelanjutan dan inklusif, konteks inklusif kita mudah-mudahan sama dengan pandangan Bapak mengenai pemerataan Pak.

Tadi mumpung ada Bu Vera juga yang terkait sama *current account defisit*, jadi memang Bank Indonesia punya program strategi khusus terkait bagaimana kita mengatasi masalah *current account defisit*, *current account defisit* tentunya kita bicara sisi ekspornya dan juga bicara sisi impornya. Oleh karena itu BI bersama dengan pemerintah sinerginya adalah mendorong beberapa sektor-sektor prioritas yang dari sudut pandang kami studi kami menunjukkan dia punya potensi, punya daya saing, punya tentunya dari sisi kompetisi dengan *peers* nya di regional kita masih cukup unggul. Sebagai misal TPT sebagai misal ... kemudian juga ada 2-3 produk yang kita terus dorong, itu yang bersama-sama dengan pemerintah kita jadikan semacam unggulan.

Tentunya kebijakannya tentunya bisa saja tidak hanya kita bicara dari sisi moneternya, yang penting kita bicarannya adalah sisi baurannya Bu, jadi akomodatifnya tidak harus dengan suku bunga kita tekan kebawah, bisa juga likuiditas kita berikan lebih longgar, bisa juga akomodatif dari sisi makroprudensial untuk *lending* banknya bisa juga lebih ekspansif.

Mungkin demikian nanti

F-PD (Hj. VERA FEBYANTHY, M.Si.):

Sebentar Pimpinan saya perlu, ini sepertinya memang sangat menarik kalau kita bicara masalah *account defisit* transaksi berjalan. Nanti pada sesi berikutnya, saya minta ini ada pendalaman secara khusus karena kan ini di dalam rapat tertutup ya terutama nanti mungkin nanti dalam ATBI, selama ini kan kami

tidak bisa masuk ke situ Pak terutama mengenai pembiayaan moneter yang memang itu dikunci di dalam undang-undang, tapi kita perlu mendapatkan, apa kalau kita bilang tuh, penyampaian kira-kira program untuk mencapai dalam defisit transaksi berjalan itu pencapaiannya seperti apa, nah itu saya perlu nanti, atau nanti malam ketika kita membahas mengenai pembiayaan itu bisa masuk kesitu, nanti mungkin tolong disiapkan data secara tertulis saja Pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, cukup Pak? Baik terima kasih kami sampaikan kepada Pak Erwin, Bu Rosmaya, Pak Dody.

F-PDIP (SIHAR P.H. SITORUS):

Izin Pimpinan apa boleh nambahkan sedikit.

KETUA RAPAT:

Silakan silakan, jadi sekarang kita masuk sesi pendalaman kalau masih ada yang ingin ditanya pendalaman silakan Pak Sitorus silakan.

F-PDIP (SIHAR P.H. SITORUS):

Ya sedikit komen aja atas tanggapan Bapak Ibu sekalian, terima kasih sebelumnya Pak Ibu sangat antusias memberikan penjelasan bagi kami membuat kami juga ingin lebih mengetahui lebih dalam. Terima kasih tadi banyak diskusi tentang ekonomi syariah, sebagai info aja buat Ibu dan Bapak sekalian mungkin supaya bisa lebih semangat lagi bahwa Mandailing Natal itu mempunyai julukan kabupaten sejuta santri, Mandailing ya, sejuta santri, jadi bisa terbayang bagaimana *value chain* yang bisa kita gerakkan disana.

Nah kembali tadi kepada tentang bagaimana asing masuk ke Indonesia mencari *return* yang lebih tinggi tentunya berarti kita punya apa istilahnya *real purchasing parity exchange rate* yang mungkin lebih bagus ya. Ini juga mungkin kita perlu diberikan penjelasan lebih jauh nanti mungkin atau sesi-sesi berikutnya dimana sih itu sehingga mereka bisa atau kita bisa mempertahankan *spread* yang *real spread* yang lebih baik dari tempat lain negara lain.

Terkait dengan *exchange rate* tadi kalau kita kalau gak salah ingat dengan apa yang saya pelajari di bangku kuliah, katanya kalau rupiah kita terapresiasi maka impor cenderung naik ekspornya cenderung turun, nah sementara dari data *GDP Growth* kita disini, ekspor ini penurunannya lebih lemah dibandingkan penurunan daripada impor, sementara kita tau negara kita lebih banyak impornya dibandingkan ekspornya sehingga terjadilah yang disebut *trading trade account*

defisit itu. Nah ini dari kebijakan *exchange rate* atau dari *interest rate policy* yang dikeluarkan Bank Indonesia, bagaimana kita bisa mengukur nilai efektivitasnya kalau kita menggunakan parameter ekspor-impor sebagai salah satu KPI tersebut, sepertinya kok gak *match* gitu ya. Itu aja sih dari saya tambahannya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya silakan Pak Fauzi.

F-P. NASDEM (FAUZI H. AMRO, M.Si.):

Saya Ketua, abis itu Pak Misbakhun kesimpulan.

Pertama saya izin terlambat tadi, saya Fauzi H. Amro Pak, dapil Sumatera Selatan I atau Palembang raya, Nasdem, dan udah ketua korwil nih sekarang.

Yang pertama saya belum bisa melihat Pak, kalau memang BI ini mendorong pertumbuhan lewat UMKM dan daerah binaan, saya pengen BI ini membuat semacam *roadmap* Pak *roadmap* kira-kira dengan melakukan mendorong pertumbuhan itu dari 5,2%, berapa persen target yang bisa dicapai lewat kawan-kawan di BI tadi, termasuk UMKM, pertumbuhan ekonomi syariah, terus membantu pesantren. Saya melihat jangan-jangan ada mengatakan kok BI udah ngurus cabai, udah ngurus pesantren, ini kan tiga tupoksi dasarnya agak bergeser Pak, nah saya jangan sampai BI ini menjadi kementerian teknis Pak Dito, udah kementerian pertanian, udah kementerian, nah ini yang jangan sampai seperti itu, *rule of game* nya itu tupoksinya tiga landasan dasar tadi menurut saya Pak, nah ini yang bagaimana menjaga moneter, kursnya bagaimana, seperti itu. Yang paling penting tiga fungsi pokok tadi jangan sampai terdegradasi gitu loh karena persoalan pengen pertumbuhan kita didorong oleh BI 5,2 menjadi 6 menjadi 7 dan seterusnya tadi. Saya mengingatkan itu aja Pak karena ada ... yang menyampaikan saya kok BI ngurusnya cabai, padi, gitu loh, sedangkan itu ada kementerian-kementerian teknis gitu loh, karena saya dulu waktu di Komisi V seluruh yang namanya dana desa tidak boleh ada keterkaitan di kementerian lain, wajib di Kemendes. Hampir semua kementerian itu ada dana desa Pak, tapi karena ada kebijakan presiden jadi di Kemendes. Itu satu Pak.

Yang berikutnya, saya pengen mengatakan bahwa bagaimana strategi BI Pak menghadapi resesi dunia yang bahasa Pak Misbakhun itu ekonomi global lagi parah lagi susah lagi ini lagi itu gitu loh. Nah saya pengen BI ini punya *roadmap* gitu loh, bagaimana jangan sampai kejadian '98 itu terulang lagi. Semua ekonom sekarang ini mengatakan resesi dunia ini *ber-impact* ke resesi ekonomi domestik seperti itu. Nah saya pengen tau Pak bagaimana BI membuat *roadmap* penanganan antisipasi lah ibarat kata kawan tuh sedia payung sebelum hujan lah kira-kira seperti itu Pak jangan sampai barang yang terjadi kita rontok seperti '98.

Nah inilah beberapa hal yang pengen saya sampaikan.

Terima kasih Pak.
Billahi Taufiq Wal Hidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Misbakhun.

F-PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.):

Terima kasih Pak Ketua.

**Yang saya hormati Pimpinan yang saya hormati,
Anggota Komisi XI yang saya hormati,
Bapak Gubernur yang sudah tidak ditempat beserta Deputy Gubernur Bank
Indonesia yang saya hormati beserta jajaran.**

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.

Ini menarik ini diskusinya Bu, Pak, karena apa, kita udah lama ini gak rapat kerja sama BI ini, udah lama, kita lebih sering FGD. Tapi ini menariknya begini Pak, saya agak diluar konteks itu, kita ini lagi ada isu yang sangat kuat saat ini adalah kalau BI, Menteri Keuangan itu kan selalu yang dibicarakan ekonomi makro, kondisi ekonomi global, bahwa situasi memang sedang mengalami koreksi pertumbuhan dari 3,6 IMF, World Bank, dan dikoreksi menjadi 3 dan sebagainya, dan kemudian kita mengantisipasi. Kalau saya lihat dalam perjalanan setelah Pak Gubernurnya ini baru, Pak Perry, ada hal yang menarik yaitu *ahead the curve* mendahului kurva ini kan selalu mengantisipasi situasi yang ada. Ini yang menjadi keanehan saya selama saya menjadi anggota Komisi XI itu pada saat kebijakan fiskalnya ekspansif, BI nya ngerem, lewat kantor *cyclical policies* untuk *value*-nya dilakukan kebijakan itu.

Tapi sekarang BI-nya melonggarkan, likuiditasnya diperbanyak, tapi ekspansi fiskalnya direm, kalau saya melihat sekarang. Nah ini kalau saya melihat ada perbedaan mazhab ini saya lihat. Lah inilah kalau menurut saya ada satu yang kemudian mau tidak mau BI harus mengantisipasi, mengantisipasinya apa, mengantisipasi jangan sampai kemudian apa yang menjadi kebijakan *ahead the curve* yang diimplementasikan dengan GWM-nya kemudian sedikit dilonggarkan, kemudian tingkat secara sistematis *7-days repo rate* nya BI dilonggarkan juga diturunkan, tapi tidak memberikan efek karena apa terjadi misalnya pemerintah sampai sekarang apa yang menjadi keinginan presiden untuk menurunkan *rate* pajak kita kan tidak berjalan, belum berjalan kalau saya mengatakan, saya tidak

boleh mengatakan tidak, belum berjalan dan belum terealisasi.

Kemudian *lending rate*, kemudian bagaimana melakukan BI kan sekarang lebih kepada makroprudensial. Bagaimana *re-structuring* sistem bank sehingga bank itu menjadi sangat kredibel, para debiturnya itu sangat kuat sehingga kalau kemudian ekonomi itu sektor riilnya diekspansi, dipenetrasi melalui kebijakan, BI-nya sudah melakukan kebijakan tapi kemudian ditambah lagi tambahan pinjaman dan sebagainya, mereka mempunyai daya tahan dan kemudian ekspansi mereka itu, tapi ini kan tidak terjadi sehingga apa, kesannya longgar di likuiditas melalui kebijakan makronya, tetapi mikroprudensialnya kan tidak jalan, pertumbuhan kredit bisa kita lihat itu dari pertumbuhan kredit, *measurement* kita kan selalu pertumbuhan kredit berapa persen.

Kalau kemudian, makanya pada saat menyusun asumsi makro, kita pertama kali di dalam APBN 2020 itu kan kita melibatkan OJK. Sementara kita ingin tau, seberapa kuat OJK itu kemudian mengatakan sistem perbankan kita di mikroprudensialnya, sektor riilnya itu *leading sector industry* nya apa sektornya apa dan siap diekspansi dengan kredit sebesar apa untuk mewujudkan pertumbuhan sebesar ini akan disiapkan seperti ini, lah BI tentunya presiden meminta misalnya *single digit lending rate* seperti apa. Tentunya nanti kan, tapi kan tidak sinkron, tidak sinkronya, BI menurunkan *7-days repo rate* nya tapi pemerintah menaikkan tingkat bunga SBN-nya, sehingga apa yang terjadi rebutan, orang mau di sektor retail, orang mau beli surat berharga negara, atau saya depositkan ke bank, karena rebutan. Seharusnya BI ini kan melakukan upaya yang serius dan sungguh-sungguh disini misalnya mengingatkan pemerintah jangan sampai terjadi rebutan seperti ini *crowding out* ini nanti, ...(suara tidak jelas) nya ini kan muter disitu aja. Akhirnya apa, Bank-nya tidak melakukan ekspansi, yang terjadi apa, bank lebih enak beli surat berharganya pemerintah daripada saya ekspansikan ke kredit, kreditnya cuma bunganya 9% *lending ratenya*, kalau saya lirikan ke UKM dalam bentuk KUR saya dapat subsidi, akhirnya kan begini aja ini, muter aja duit ini, sektor riilnya, akhirnya apa duit berbunga duit, orang beli duit, duit beli duit, akhirnya apa sektor riilnya yang tidak tumbuh. Nah ini kan berbahaya, lah ini siapa yang akan melempengkan situasi ini, meluruskan keadaan yang tidak sinkron ini kan.

Lah, ini yang kalau menurut saya BI harus punya keberanian mengingatkan bahwa situasi ini kan tidak sehat terhadap situasi makro ekonominya, gak sehat Pak, dan kita harus jujur mengatakan ini situasi ini gak sehat loh. Presiden ingin ekonominya tumbuh, sektor riilnya tumbuh, UMKM tumbuh tadi kita bicara UMKM, tapi kan apa yang terjadi kan enggak, karena apa, ada benang kusut yang belum kita urai terus kemudian kita menginjak kegiatan yang lain, padahal kegiatan lain ini kalau tidak kita yang benang kusutnya ini kita urai dulu kita gak bisa *sequent* ke berikutnya. Lah inilah kalau menurut saya ini butuh, saya gak tau ini kita diskusinya kita ini BI-nya berani gak mengingatkan yang seperti ini. Karena apa, sangat serius pemerintah mencetak surat hutang dalam rangka menutup defisit ketika pemerintah sudah tidak bicara bilateral multilateral lembaga donor langsung

masuk ke *market*, inilah yang terjadi ketika pemerintah melakukan *issued bond*, *treasury bill* *government treasury bill*-nya *government bond*-nya itu langsung ke *market* kan resikonya ini, kita selalu di-*brief* oleh BI ini kan, oke pemilik surat hutang kita berapa persen asing, resikonya ada berapa dan sebagainya, redenominasi berapa, ini kan kita paham semuanya, tapi ada situasi yang seperti ini.

Kalau menurut saya ini salah satu yang harus bisa memecahkan ini apakah tidak baiknya, ini diskusi ini Pak Erwin sudah hampir 5 tahun, yang lainnya ini Pak jadi deputy gubernur. Ini kita mulai berpikir ulang ini Pak, berpikir ulang, apalagi tadi disampaikan dipaparan uangnya BI ini masih ada surplus 17 triliun yang mau dikembalikan ke pemerintah di anggarannya, apakah gak dipikir ulang Pak, OJK ini kita balikin aja ke BI, OJK kita balikin aja ke BI, itu. Kalau kita lihat situasinya kan ini, itu, tentunya dengan desain yang berbeda, tentunya dengan desain berbeda karena kan dulunya kan kita bicara soal pengawasan banknya, nanti tentunya figur *and profiling* sentral bank ini akan menjadi sangat besar karena ada IKNB yang akan masuk disana, termasuk *capital market*, pasar modal, yang akan menjadi ini, ini kan ini hanya wacana ini Pak, kan kita lihat tadi kalau situasi makro ekonominya seperti itu, karena apa ternyata pemisahan makroprudensial dan mikroprudensial yang terpisah secara garis demarkasi yang sangat jelas dan diatur oleh undang-undang yang berbeda ternyata dalam praktek itu gak *blend* ininya Pak, dan di dalam makro ekonominya kan gak jalan. Memang ada *ex-officio* BI di OJK, *ex-officio* menteri keuangan di OJK, bahkan di LPS ada *ex-officio* BI ada *ex-officio* pemerintah, ada *ex-officio* OJK juga, sama-sama punya *ex-officio* nya tapi *window* yang diciptakan ini kan tidak membuat kemudian kebijakan itu terkoordinir dengan sinergis. Lah inilah kalau menurut saya.

Tempat kita mengadopsi sistem *financial services* OJK, Inggris sudah tidak mengadopsi itu dan bahkan cenderung mengembalikan situasi kepada keadaan awal. Ada situasi Perancis yang mengadopsi OJK punya, bank sentral punya, tetapi *in one body with different system*. Lah ini yang harus kita mau cari model yang seperti apa, ya kalau kita mau jujur mengatakan dalam sejarahnya nanti kita akan ditanya ditagih sama orang ya kita pernah melakukan menerapkan sebuah sistem dan kita mengakui bahwa sistem itu tidak efektif walaupun kita mau mengatakan oh tidak gagal sepenuhnya. Tapi ini membuat ekonomi tidak berjalan efektif Pak, lah ini kan kita harus mempunyai kejujuran dan punya kebesaran hati untuk mengakui hal yang seperti ini, karena apa *the ending of our objective* itu adalah apa ya ekonomi harus tumbuh, pengambil kebijakan, pengambil *policy* di makro dan mikroprudensialnya harus melihat situasi ini, situasi ini Pak, dan ini harus kita akui keadaan ini tidak membuat otoritas yang berbeda ini membuat sinergis tidak loh Pak. Contoh yang sederhananya, soal fintek saja, kita ini kobol-kobol Pak terpontal-pontal dengan isu yang ada, gerakannya begitu sangat cepat, mereka langsung ada di pasar, langsung diaplikasikan seperti itu, tapi kemudian regulasi kita tertinggalan, regulasi sentral banknya ketinggalan, regulasi OJK-nya ketinggalan, dan sebagainya. Karena apa, sifat dasar industri

start-up digital disruption ini semakin mereka melanggar aturan mereka makin laku, lah ini kan yang harus kita antisipasi. Kalau kemudian pintunya kebanyakan, atau gedungnya satu tapi pintunya kebanyakan, gedungnya dua tapi jendelanya kebanyakan, pintunya satu jendelanya kebanyakan kan juga jadi masalah.

Lah inilah kalau menurut saya ini sebagai sebuah poin untuk kita diskusi dan pemikiran, ini bisa menarik ini Pak, mumpung ini awal-awal DPR, kalau kita disuruh kerja yang capek itu kan masih enak, itu.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Silakan dek Puteri.

F-PG (PUTERI ANETTA KOMARUDDIN, B.Com.):

Siap kak, terima kasih kakak.

Izin kakak Dito dan kakak-kakak lainnya.

Ini sebenarnya kelanjutan dari yang tadi udah diomongin ama kakak Misbakhun, cuman saya sebagai adek dan anak-anaknya kakak-kakak yang ada disini ingin mengajak juga untuk Bapak Ibu dari dewan gubernur BI untuk menyampaikan paparan terkait dengan pendalaman dan kajian untuk regulasi yang akan kita siapkan terkait dengan fintek, kenapa, karena sekarang payung hukumnya fintek itu baru ada di PBI dan POJK, belum ada yang mengatur dari undang-undang dari pemerintahannya sendiri, dan dengan itu kita membutuhkan bahan yang memang relevan dengan kondisi sekarang gitu karena seperti yang kita tau korbannya juga makin banyak berjatuh dan baru bisa dipidanakan kalau mereka sudah menyentuh penyebaran data pribadi nasabah. Itu kan sudah sering kita baca juga, sudah sering kita dengar juga ceritanya di koran dan juga dari masyarakat gitu.

Tapi terkait dengan payung hukumnya tentu saja kita membutuhkan evaluasi dari BI sendiri terutama sebagai bagian dari KSSK, dimana kita tau bahwa masih terdapat ego-ego sektoral antar kementerian dan juga lembaga yang ada di KSSK dimana permintaan data antar lembaga itu tidak terlalu lancar karena saya dulu pernah di OJK jadi saya tau ada sentimen antara BI dan OJK yang menyebabkan kadang koordinasinya juga banyak yang mandek gitu.

Jadi kita ingin berdiskusi dengan KSSK dan juga terutama BI terkait dengan kajian-kajian evaluasi terkait koordinasi antar lembaga ini, bagaimana kita nanti bisa menciptakan pengawasan fintek dan juga peraturan perundang-undangan yang memang dibutuhkan untuk penyembuhan penyakit fintek yang sekarang sudah makin banyak makan korban gitu.

Ya sekian saja dari saya, terima kasih kakak-kakak yang di depan.
Dikembalikan.

KETUA RAPAT:

Baik.

Ada lagi yang lain, Bu Ela gak ada? Pak? Cukup ya. Baik terima kasih Pak Erwin, Pak, eh siapa, oh Bu Anis silakan.

F-PKS (Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si.):

Sedikit saja, izin Pimpinan sedikit saja. Tadi menyinggung tentang KNKS ya, KNKS, ini sejauh mana *link and match* nya antara KNKS kemudian Bappenas, dan BI, karena *leading sector* nya itu tiga ya Bappenas sebagai sekretaris KNKS, kemudian ada *ex-officio* BI juga ya di KNKS ya? Tidak ada? Berarti mohon dijelaskan bagaimana *link and match* nya dan kemudian bagaimana program ini menjadi terintegrasi termasuk *masterplan* nya Pak silakan.

Terima kasih.

F-PD (Hj. VERA FEBYANTHY, M.Si.):

Terakhir, tadi saya ingin tanyakan tapi tertinggal.

Boleh nanti dilampirkan atau disusulkan data mengenai *blueprint* ekonomi keuangan syariah Pak kira-kira prognosanya 2020 mau kemana, kan ini juga ada tadi kan Pak Sihar bilang di kabupaten beliau itu ada satu juta santri kalau di kabupaten saya itu terkenal karena saya dapil karawang itu seribu pesantren, nah itu maksudnya ngerti kan Pak, nah iya seribu pesantren, itu terkenal, itu baru satu kabupaten, enggak ini karawang loh, bukan karawang hanya beberapa dapil kalau seribu itu, itu pesantren tapi satu pesantren itu jumlahnya ribuan Pak saya ngomong seribu pesantren, tapi jumlah santrinya itu ribuan yang sudah terdaftar itu 10 ribu.

Nah maksud dan pertanyaannya adalah saya ingin mendapatkan *roadmap* di Jawa itu penetrasinya berapa, Jawa Barat, Medan, per provinsi, supaya kita lihat apakah ini. Intinya adalah dalam rangka kami ini Pak sebagai anggota dewan ketika kami disumpah itu kami memperjuangkan aspirasi, jadi kita ingin tanyakan bahwa ketika nanti kami turun bahwa ini sudah dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai mitra kerja Komisi XI, kami membantu melakukan sosialisasi tersebut sehingga kami juga bisa diajak untuk melakukan kegiatan tersebut dalam rangka memberikan supervisi.

Jadi saya kira itu saja.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, kalau sudah tidak ada lagi, cukup Pak ya? Kita langsung masuk ke kesimpulan.

DEPUTI GUBERNUR BANK INDONESIA (ERWIN RIJANTO):

Mohon izin Pak sedikit Pak.

KETUA RAPAT:

Oh silakan-silakan silakan Pak Erwin.

DEPUTI GUBERNUR BANK INDONESIA (ERWIN RIJANTO):

Baik, tadi Pak, kita catat Pak, kemudian untuk Pak Fauzi ini betul Pak jadi kami ini memang tidak bermaksud untuk mengambil alih kementerian, UMKM, maupun kementerian pertanian. Apa yang kita lakukan adalah terkait dengan tugas pokok kita, misalnya contohnya ...(suara tidak jelas) kami memang mencoba untuk masuk tetap pada cabai, tetapi itu sifatnya hanya kluster dan kita percontohan, yang nantinya kita akan lakukan bekerja sama dengan karena kita juga sebagai apa namanya, memberikan masukan kepada kepala daerah, lah ini kita memang nantinya akan meminta kepala daerah untuk melakukan replikasi yang sudah berhasil. Jadi memang tujuan kita tidak untuk mengambil alih tugas-tugas mikro dari departemen-departemen tersebut.

Kemudian kalau Pak Misbakhun, itu terlalu anu Pak nanti mohon Bapak yang mempunyai kewenangan untuk mem bahas nya, bukan bagian dari kami Pak gitu.

Selanjutnya kalau yang untuk syariah itu kembali lagi saya kembalikan lagi kepada Pak Dody mungkin ada yang ditambahkan yang terkait dengan tadi syariah-syariah.

DEPUTI GUBERNUR BANK INDONESIA (DODY BUDI WALUYO):

Makasih Pak Ketua, sedikit saja Pak, mohon Bu Anis nanti kita kalau ini kita perdalam lagi, tapi secara singkat KNKS itu kan ada dewan pengarah disitu ada enam kementerian dan tiga lembaga termasuk BI disitu, sekretariat eksekutifnya adalah dari Bappenas, *lead* nya oleh Presiden. Jadi mereka mengkoordinir semua inisiatif terkait dengan pengembangan eksyar di republik ini.

Kalau terkait sama program kerjanya, inisiatif BI itu menjadi masukan kepada KNKS inisiatif dari enam tadi itu menjadi masukan kepada KNKS membentuk MAKSI (*Masterplan* Keuangan Syariah). Jadi itu jadi sebenarnya itu menjadi payung dari semua kegiatan ekonomi keuangan syariah di Indonesia.

Bukan, jadi kita yang memberikan, mereka yang mensinergikan semua inisiatif yang ada dari kementerian/lembaga.

Mungkin dalam kesempatan ini Pak Ketua kami hari rabu akan membuka Indonesia Sharia Economic Festival, undangan sudah disampaikan kepada semua anggota dewan Komisi XI mudah-mudahan bisa hadir untuk melihat *showcase* kemajuan ekonomi syariah di Indonesia.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik kalau sudah tidak ada lagi, kita langsung masuk ke kesimpulan Pak ya, coba tayangkan.

Kesimpulan rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Bank Indonesia masa sidang I 2019-2020, Senin 11 November tahun 2019, ada masalah? Ya,

1. Komisi XI DPR RI dan Bank Indonesia sepakat akan melakukan pendalaman pembahasan rencana anggaran Bank Indonesia RATBI tahun 2020 pada rapat panitia kerja penerimaan dan panitia kerja pengeluaran RATBI tahun 2020 yang akan dijadwalkan pada tanggal 12 sampai dengan 14 November 2019.

Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

2. Pengambilan keputusan atas rencana anggaran Bank Indonesia tahun 2020 akan dilaksanakn pada hari kamis 14 November 2019. setuju?

(RAPAT: SETUJU)

F-PD (Hj. VERA FEBYANTHY, M.Si.):

Sebentar, untuk tanggal 14 November ini kan keputusannya, artinya sudah final, pembedahannya di 12 sampai 14, itu yang saya tadi sempat kritisi kita cuman dikasih waktu satu hari untuk membedah, dua hari lah, tapi kan ini kan pembiayaan dan pengeluaran jadi masing-masing pembiayaan dan penerimaan masing-masing itu kan satu-satu, apakah itu digabungkan? Nah ini-ini, gak anggotanya?

KETUA RAPAT:

Anggotanya enggak, anggotanya sendiri-sendiri jadi ada dua panja, panja penerimaan

F-PD (Hj. VERA FEBYANTHY, M.Si.):

Tadi saya diskusi dengan Pak Urip, itu jadi semua anggota itu masuk jadi tinggal hari ini.

KETUA RAPAT:

Enggak-enggak, sudah ada surat dari kita, dari Pimpinan kepada seluruh posisi nama-nama panja penerimaan siapa nama-nama panja pengeluaran siapa, sudah ada.

F-PD (Hj. VERA FEBYANTHY, M.Si.):

Saya sudah terima, maksudnya saya paham dibagi dua untuk panjangnya penerimaan dan pembiayaan, jadi itu satu hari bersamaan di kamar sebelah atau bagaimana gitu loh.

KETUA RAPAT:

Iya-iya kamar sebelah.

F-PD (Hj. VERA FEBYANTHY, M.Si.):

Oke. Ini tolong Pak sebagai usulan saya, ini sebetulnya saya bisa untuk kali ini tahun anggaran ini saya bisa maklumin, tapi untuk tahun depan tolong kita tidak punya, jangan dibiarkan Komisi XI itu melimpahkan satu pekerjaan membedah ATBI itu hanya satu hari yang anggarannya itu sampai berapa triliun tadi, 9 triliun. Ini naif sekali bagi kami untuk membedah, jadi saya butuh waktu dan kami semua hanya berapa jam kita akan membedah sebuah anggaran mata anggaran yang jumlahnya 9 triliun dalam satu malam saja sekejap. Jadi sementara tanggal 14 kita sudah harus final, mau tidak mau kita ketok kan, itu keputusannya.

Jadi untuk kali ini saya bisa terima tapi untuk berikutnya tolong ini tidak bisa seperti ini Pimpinan, perlu ada *exercise* dulu di awal.

Makasih.

KETUA RAPAT:

Baik, ini kan panjangnya sampai malam, kalau perlu sampai pagi.
Oke-oke.

3. Komisi XI DPR RI meminta Bank Indonesia untuk menyampaikan jawaban lengkap secara tertulis terhadap pertanyaan dari Pimpinan dan anggota Komisi XI DPR RI paling lambat sebelum dilaksanakan rapat kerja RATBI

tahun 2020.
Setuju Pak ya.

(RAPAT: SETUJU)

Dengan demikian kesimpulan satu, dua, tiga dapat kita terima semua?

(RAPAT: SETUJU)

Baik kami ucapkan terima kasih kepada Deputi Bank Indonesia, Pak Erwin, Bu Rosmaya, Pak Dody, dan Pak Sugeng, dan seluruh jajarannya, Pimpinan dan anggota Komisi XI DPR RI yang telah mengikuti raker pada siang hari ini, mudah-mudahan ini semua bermanfaat dan kita akan lanjutkan dengan FGD nanti malam, kita sholat maghrib disana, makan malam terus jam 7 tepat kita mulai, jam 9 selesai. Setuju?

Baik sekian terima kasih, *closing statement* silakan Pak dari Pak Erwin.

DEPUTI GUBERNUR BANK INDONESIA (ERWIN RIJANTO):

Baik Pimpinan. Pak Dito dan para Pimpinan maupun anggota yang saya hormati. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan ini, dan kami akan mempersiapkan semuanya itu apa yang diminta oleh Bapak Ibu dari anggota akan kita selesaikan dengan secepat-cepatnya dan kita laksanakan.

Demikian.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Dengan mengucapkan *hamdallah, alhamdulillahirobbilalamin*, Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Bank Indonesia saya tutup.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 15.50 WIB)

Jakarta, 11 November 2019

**a.n. Ketua Rapat
Sekretaris Rapat**

ttd

Drs. Urip Soedjarwono

19620521 198203 1 001